

**TRANSFORMASI SISTEM PENDATAAN SOSIAL PROGRAM
KELUARGA HARAPAN DI KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Skripsi

Oleh :

**ATHAYA ZULFA ZEIN YASIEN
2256041012**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**TRANSFORMASI SISTEM PENDATAAN SOSIAL PROGRAM
KELUARGA HARAPAN DI KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA**

**Oleh
ATHAYA ZULFA ZEIN YASIEN**

**Skripsi
Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada
Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

TRANSFORMASI SISTEM PENDATAAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Oleh

ATHAYA ZULFA ZEIN YASIEN

Sistem pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih mengalami kasus *exclusion error* dan *inclusion error* yang menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran. Atas permasalahan tersebut, presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dipandang lebih akurat dan terintegrasi dalam meningkatkan ketepatan sasaran bansos. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi DTSEN dalam meningkatkan ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi Mazmanian dan Sabatier (1983). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi DTSEN terlihat dari adanya kejelasan isi dan konsistensi kebijakan, komitmen dan integrasi yang kuat dari lembaga atasan, dukungan akses publik dan adaptasi teknologi. Namun, efektivitas implementasi masih dibatasi oleh kompleksitas integrasi data, gangguan pada sistem, kesenjangan antarwilayah, ketiadaan biaya operasional di lapangan, serta resistensi sosial akibat dinamika pemutakhiran data. Kesimpulan penelitian ini adalah implementasi DTSEN sudah berkontribusi dalam meningkatkan ketepatan sasaran PKH walaupun belum berjalan dengan optimal.

Kata Kunci : Sistem, Pendataan, DTKS, DTSEN, PKH

ABSTRACT

TRANSFORMATION OF THE SOCIAL DATA RECORDING SYSTEM FOR THE FAMILY HOPE PROGRAM AT THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

By

ATHAYA ZULFA ZEIN YASIEN

The Integrated Social Welfare Data (DTKS) system continues to experience exclusion and inclusion errors, which can lead to inaccurate targeting of social assistance. To address this issue, the President issued Presidential Instruction No. 4 of 2025 concerning the National Single Social and Economic Data (DTSEN), which is considered more accurate and integrated in improving the targeting accuracy of social assistance. This study aims to determine the implementation of DTSEN in improving the targeting accuracy of the Family Hope Program (PKH). This study used a descriptive qualitative research method with a case study approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. This study was analysed using the implementation theory of Mazmanian and Sabatier (1983). The results indicate that the successful implementation of DTSEN is evident in the clarity of content and consistency of policies, strong commitment and integration from superior institutions, support for public access, and technological adaptation. However, implementation effectiveness is still limited by the complexity of data integration, system disruptions, disparities between regions, lack of operational costs in the field, and social resistance due to the dynamics of data updates. This study concludes that the implementation of DTSEN has contributed to improving the targeting accuracy of PKH, although it has not yet be optimally.

Keywords : System, data, DTKS, DTSEN, PKH

Judul

**: TRANSFORMASI SISTEM PENDATAAN
SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DI KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA**

Nama Mahasiswa

: Athaya Zulfa Zein Yasien

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2256041012

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H.
NIP. 196908151997032001

Fery Triatmojo, S.A.N., M.PA.
NIP. 198212112006041001

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.
NIP. 197009142006042001

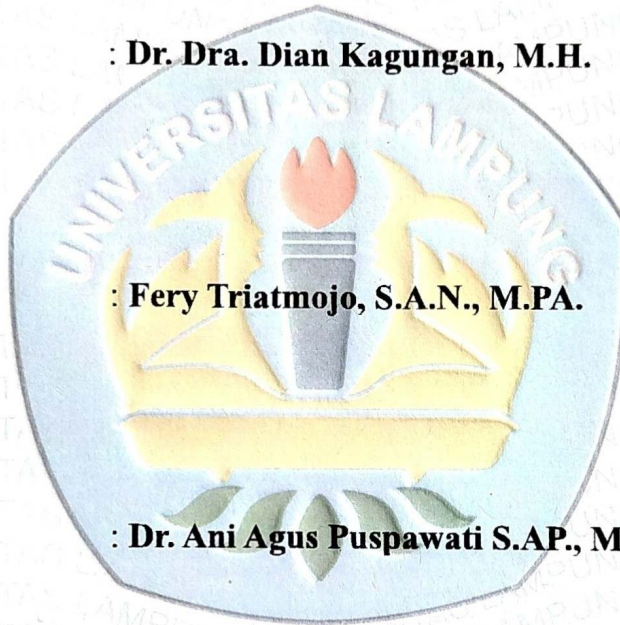
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H.**

Sekretaris : **Fery Triatmojo, S.A.N., M.PA.**

Penguji : **Dr. Ani Agus Puspawati S.AP., M.AP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **02 Februari 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 2 Februari 2025
Yang membuat pernyataan,



Athaya Zulfa Zein Yasien
NPM. 2256041012

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Athaya Zulfa Zein Yasien, lahir di Kota Subang pada tanggal 11 Februari 2005. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, puteri dari pasangan Bapak Ayub Muhamad Yasien dan Ibu Kurniasih. Penulis memulai pendidikan dari Raudhatul Athfal Nurul Hikmah, lalu penulis melanjutkan pendidikan dasar di MI Ash-Sholahiyah dan lulus pada tahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Libaasut Taqwa. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Jatisari dan lulus pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis aktif di berbagai organisasi internal dan eksternal kampus. Dalam organisasi internal, penulis mengikuti organisasi BEM Universitas Lampung sebagai Staf Ahli Kementerian Sosial Masyarakat, DPM Universitas Lampung sebagai Staf Ahli Komisi 4 Administrasi dan Keuangan, UKM Penelitian sebagai anggota Departemen Kaderisasi, dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai anggota bidang Kajian Pengembangan Keilmuan dan Dana Usaha kemudian di akhir periode tahun 2025 menjabat sebagai Sekretaris Bidang Kajian Pengembangan Keilmuan. Dalam organisasi eksternal, penulis bergabung dalam Komunitas Kejar Mimpi Lampung sejak tahun 2024 sebagai *member of public relation* dan pada tahun 2025 menjabat sebagai *Head of Division Public Relation*.

Pada bulan Januari – Februari 2025, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN), di Desa Tanjung Kerajan, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya pada bulan Juni – Agustus 2025, penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kementerian Sosial dan ditempatkan di bagian Tata Usaha Direktorat Jaminan Sosial.

MOTTO

“Stay positive and keep pushing forward, even when things are tough”

(Seo Changbin from Straykids)

“do it, do it, do it, do it, just do whatever you wanna do, I guarantee that it’s the best for you”

(Do it by Stray Kids)

“Jangan takut menghadapi apa yang akan terjadi ke depan, karena sering kali kenyataannya tidak seburuk yang kita bayangkan”

(Athaya)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya yang tiada henti. Atas kehendak dan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan penuh rasa syukur. Penulis menyadari bahwa tanpa pertolongan-Nya, penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Bapak Ayub M. Yasien

Ibu Kurniasih

Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, doa, dan kasih sayang yang tiada henti dipanjatkan, dengan penuh ketulusan telah menjadi sumber kekuatan utama dalam setiap langkah perjalanan.

Saudaraku Tersayang

Nurfaiz Fathurrahman Yasien

Keiysa Rifqa Labiba Yasien

Terima kasih telah menjadi penyemangat dalam setiap proses dan tahapan yang dilalui.

Keluarga Besar Bani Wasdi dan Bani Yasien

Terima kasih atas doa, dukungan, serta motivasi yang diberikan dengan penuh ketulusan, sehingga menjadi sumber tambahan semangat dan kekuatan.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, rezeki, dan kasih sayang-Nya. Atas izin dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Transformasi Sistem Pendataan Sosial Program Keluarga Harapan di Kementerian Sosial Republik Indonesia”** dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin. Penulis menyadari bahwa selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan keterbatasan. Namun, berkat bimbingan, dukungan, kerja sama dari berbagai pihak, serta pertolongan Allah SWT, seluruh hambatan tersebut dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Dian Kagungan, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berarti sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Di tengah kesibukan, ibu tetap meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah, kekhawatiran, serta berbagai kesulitan yang dihadapi penulis selama proses perkuliahan, sehingga menjadi sumber ketenangan dan penguat bagi penulis dalam menjalani setiap tahapan. Semoga Ibu Dian senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan segala hal baik oleh Allah SWT.
2. Bapak Fery Triatmojo, S.A.N., M.P.A., selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, serta saran dan masukan yang sangat berarti bagi penulis selama proses penyusunan skripsi. Berkat kesabaran dan perhatian yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Semoga Allah SWT

senantiasa melimpahkan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam setiap urusan Bapak.

3. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.A.P., M.A.P. selaku dosen pembahas dan penguji yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan serta saran dan masukan yang sangat berharga dalam menyempurnakan dan memperbaiki kekurangan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam setiap aktivitas dan pengabdian Ibu.
4. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S. Sos., M. Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Susana Indriyanti Caturiani, S. IP., M. Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran yang diberikan kepada saya selama proses perkuliahan, semoga ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan saya kedepannya serta menjadi amal jariyah bagi Bapak dan Ibu dosen. Semoga bapak dan ibu senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan di segala urusan oleh Allah SWT.
7. Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah membantu dan mengarahkan dalam pengurusan berkas selama proses perkuliahan hingga terselesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
8. Seluruh stakeholder Kementerian Sosial yang terlibat dalam penelitian (Tim Pokja Bansos Direktorat Jaminan Sosial, Tim Pelayanan Penggunaan dan Diseminasi Data Kesejahteraan Sosial, Ketua Tim *Software Development*). Terimakasih telah bersedia meluangkan waktu, berbagi pengetahuan, serta menyampaikan berbagai informasi secara terbuka selama proses penelitian berlangsung. Peran aktif dan kerja sama yang diberikan sangat membantu penulis dalam menghimpun data yang mendalam, valid, dan relevan. Tanpa keterlibatan para informan, penelitian ini tidak akan berjalan secara optimal.

9. Mama dan Papa. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari pengorbanan, kesabaran, serta perjuangan Mama dan Papa yang tidak pernah lelah dalam mendampingi, mendoakan, dan menguatkan penulis, baik dalam keadaan sulit maupun lapang. Setiap nasihat, keikhlasan, dan cinta yang diberikan menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga di masa mendatang penulis mampu membalas segala kebaikan dan pengorbanan tersebut dengan menjadi pribadi yang lebih baik, berbakti kepada orang tua, serta memberikan kebahagiaan dan kebanggaan sebagaimana yang selalu Mama dan Papa harapkan. Penulis berdoa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta kebahagiaan kepada Mama dan Papa, baik di dunia maupun di akhirat.
10. Aa Faiz dan Dede Echa. Terimakasih atas perhatian, doa, serta dukungan moral yang senantiasa diberikan selama kuliah dan proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan limpahan keberkahan, kelancaran dalam setiap langkah, serta kebahagiaan bagi kalian semua.
11. Bibi Oot dan Om Ali. terima kasih telah menjadi orang tua kedua bagi penulis selama proses perkuliahan ini, yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, serta dukungan moral dalam berbagai situasi. Kehadiran dan kepedulian yang diberikan menjadi sumber kenyamanan dan kekuatan bagi penulis dalam menjalani setiap proses hingga penyusunan skripsi ini
12. Uus, Adepe, Iqlima, Aldi, dan Ojan. Terima kasih atas kebersamaan, ketulusan, dan dukungan yang terus mengiringi perjalanan perkuliahan penulis. Kehadiran kalian, baik sebagai teman berdiskusi, berbagi cerita, maupun saling menguatkan di masa sulit dan bahagia, memberikan arti tersendiri dan menjadi sumber semangat bagi penulis dan keikhlasan dalam menemani setiap proses menjadi penguat yang tidak tergantikan hingga mampu menyelesaikan perkuliahan serta penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah meyakinkan penulis untuk tidak terus terjebak pada kejadian-kejadian buruk di masa lalu, serta mengajarkan untuk kembali melihat dan percaya pada hal-hal baik yang menanti di masa depan. Serta kebersamaan yang terjalin selama prosesnya akan selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis. Semoga Allah

SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kemudahan, dan kebahagiaan dalam setiap langkah yang kalian tempuh.

13. Jamet Balrek (Aldi, Fauzan, Andi, Michael, Mardho, Kanu, Madun, Kak Mona, Ulva, Sania, Fairuz). Terima kasih telah hadir dan menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan ini, sejak awal pertemuan di organisasi hingga proses panjang yang penulis lalui sampai saat ini. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai teman berproses, tetapi juga menjadi tempat pulang dan ruang berbagi ketika penulis menghadapi berbagai kesulitan dan kelelahan. Terima kasih telah setia kebersamai, menemani, serta menjadi sumber dukungan dan penguat di setiap tahap perjalanan perkuliahan, sekaligus menjadi tempat melepaskan penat di tengah padatnya tanggung jawab dan tuntutan akademik. Kebersamaan, canda, dan solidaritas yang terbangun selama ini menjadi kenangan berharga sekaligus penguat bagi penulis untuk terus melangkah dan bertumbuh.
14. Teman-teman PASGIN (Sukma, Daffa, Syifa, Vivi, Annisa) , terima kasih telah senantiasa kebersamai dan menjaga kekompakan yang terjalin, berawal dari sebuah kelompok, perlahan berkembang menjadi ruang berbagi cerita, tempat menyampaikan keluh kesah, serta menjadi sarana untuk saling menguatkan dan mengurangi tekanan selama menjalani proses akademik. Kesenangan yang tercipta menjadi bagian berharga yang membantu penulis bertahan dan menyelesaikan perkuliahan serta penyusunan skripsi ini.
15. Isnai, Sherina, Keiko. Terimakasih telah menjadi bagian berharga dalam perkuliahan ini. Kepada Isnai, terimakasih telah kebersamai, bertukar pikiran dan membantu kesulitan yang dihadapi penulis. Kepada Sherina, terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita yang nyaman dan menyenangkan, serta selalu bersedia memberikan bantuan ketika penulis membutuhkan. Kepada Keiko, terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan, kebersamaan selama praktik kerja lapangan, serta menjadi rekan sekaligus *roommate* selama 40 hari yang meninggalkan banyak kenangan.
16. Ucup, Devan, Maytra, terimakasih telah menjadi teman yang baik meskipun kita kenal dalam waktu yang singkat. Kehadiran kalian memberikan kesan, baik melalui dukungan, obrolan, maupun kebersamaan yang membantu penulis

dalam menjalani proses perkuliahan dan penyusunan karya ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap prosesnya.

17. Teman-teman 23 & 24 Bidang Kajian Pengembangan Keilmuan, terima kasih atas kebersamaan dan proses yang telah dijalani bersama, mulai dari saling berdiskusi, bekerja sama, hingga saling menyemangati dalam berbagai situasi. Dukungan dan kekompakan yang terbangun selama berorganisasi menjadi pengalaman berharga yang turut menemani perjalanan perkuliahan penulis
18. Straykids, Zerobaseone, Alpha Drive One. Terimakasih telah menemani penulis dalam proses perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Melalui karya lagu yang didengarkan di berbagai suasana yang tidak hanya menjadi teman belajar, tetapi juga memberikan semangat, motivasi, serta energi positif yang membantu penulis tetap bertahan dan fokus di tengah rasa lelah dan kejenuhan selama proses akademik.
19. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi substansi maupun penyajiannya. Oleh sebab itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran sebagai upaya penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, memperkaya wawasan keilmuan, serta menjadi bahan rujukan bagi pihak-pihak terkait.

Bandar Lampung, 2 Februari 2026

Penulis

Athaya Zulfa Zein Yasien

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Kebijakan Publik	11
2.2.1 Konsep Kebijakan Publik	11
2.2.2 Konsep Implementasi Kebijakan.....	12
2.2.3 Model-model Implementasi Kebijakan	13
2.3 Program Keluarga Harapan (PKH)	25
2.4 Sistem Pendataan Sosial.....	27
2.4.1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).....	27
2.4.2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)	28
2.4.3 Dinamika Perubahan Sistem Pendataan Sosial	29
2.5 Kerangka Pemikiran.....	32
III. METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
3.2 Fokus Penelitian	36

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.4 Sumber Data.....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Teknik Analisis Data.....	41
3.7 Teknik Keabsahan Data	43
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
4.1.1 Sejarah Kementerian Sosial.....	45
4.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Sosial.....	46
4.1.3 Tugas dan Fungsi Kementerian Sosial	49
4.1.4 Struktur Organisasi.....	50
4.2 Hasil Penelitian	54
4.2.1 Karakteristik dari masalah (<i>Tractability of The Problems</i>).....	54
4.2.2 Karakteristik Kebijakan Undang-undang (<i>ability of statute to structure implementation</i>).....	70
4.2.3 Variabel di Luar kebijakan (<i>Nonstatutory Variables Affecting Implementation</i>).....	88
4.2.4 Tahap-tahap Dalam Proses Implementasi	103
4.3 Pembahasan.....	125
4.3.1 Transformasi DTKS ke DTSEN.....	125
4.3.2 Karakteristik dari masalah (<i>tractability of the problems</i>).....	131
4.3.3 Karakteristik Kebijakan Undang-Undang (<i>ability of statute to structure implementation</i>).....	143
4.3.4 Variabel di luar kebijakan (<i>nonstatutory Variables ables affecting implementation</i>).....	165
4.3.5 Tahap-tahap Dalam Proses Implementasi	181
V. KESIMPULAN DAN SARAN	207
5.1 Kesimpulan	207
5.2 Keterbatasan Penelitian	208
5.3 Saran.....	209
DAFTAR PUSTAKA.....	211
LAMPIRAN	220

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier	18
2. Kerangka Berpikir Penelitian.....	34
3. Struktur Organisasi Kementerian Sosial	53
4. Distribusi Jumlah Penduduk dan Keluarga per Desil	64
5. Sebaran Desil Bantuan Sosial	65
6. Proses Usulan Data	81
7. Timeline Usulan Bansos	82
8. Komentar dukungan kebijakan DTSEN	93
9. Komentar Kritik Masyarakat	94
10. Bimbingan Teknis DTSEN Pemkab Bojonegoro	101
11. Bimbingan Teknis DTSEN Pemerintah Kota Depok.....	101
12. Bimbingan Teknis DTSEN Pemerintah Kabupaten Lamongan.....	101
13. Fitur View DTSEN dalam SIKS-NG.....	107
14. Fitur Usulan Bansos dalam SIKS-NG	108
15. Fitur Usulan Pembaruan dalam SIKS-NG	108
16. Fitur Musdes/Muskel dalam SIKS-NG.....	109
17. Tampilan Profile di Aplikasi Cek Bansos.....	110
18. Fitur Usulan Bansos di Aplikasi Cek Bansos	111
19. Fitur Sanggahan Bansos di Aplikasi Cek Bansos	112
20. Fitur Cek Bansos.....	112
21. Jumlah KPM PKH Usia Produktif dengan Kepesertaan Lebih dari 5 Tahun	119

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	7
2. Informan Penelitian.....	40
3. Dokumen Penelitian.....	41
4. Variabel DTSEN Keluarga	56
5. Variabel DTSEN Individu	57
6. Rincian Ketidaklayakan Penerima Bansos	68
7. Perbedaan DTKS dan DTSEN.....	128
8. Matriks Analisis Teori Mazmanian dan Sabatier.....	198

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan isu multidimensional yang sejak lama menjadi perhatian global karena dampaknya yang luas terhadap kualitas hidup masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi kemiskinan sebagai hambatan struktural yang mengurangi kesejahteraan masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi (Setiawan dkk., 2024). Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 adalah 8,47%, yaitu sekitar 23,85 juta jiwa. Angka ini menurun dibandingkan September 2024, yang mencapai 8,57%, atau sekitar 24,06 juta jiwa (BPS, 2025). Meskipun mengalami sedikit penurunan, jumlah penduduk miskin masih sangat tinggi, yang berarti kemiskinan masih menjadi masalah besar yang membutuhkan intervensi yang kuat dan komprehensif.

Pemerintah terus berupaya menurunkan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan berbagai program bantuan sosial salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH). Kementerian Sosial menjelaskan PKH sebagai upaya pengurangan kemiskinan yang dipimpin oleh pemerintah pusat, dengan bantuan dari pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kota (Kamariani dkk., 2024). Di dunia internasional, PKH dikenal sebagai *Conditional Cash Transfers* (CCT) yang berarti memberikan uang kepada masyarakat dengan kondisi tertentu. Program ini telah berjalan dengan baik dalam mengurangi kemiskinan, terutama kemiskinan jangka panjang, dan mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2007 (Kamariani dkk., 2024). Keberhasilan penyaluran PKH sangat bergantung pada akurasi sistem pendataan sosial sebagai dasar penetapan penerima manfaat.

Informasi pendataan sosial digunakan untuk menentukan keluarga yang akan menerima bantuan, seberapa besar dukungan yang mereka terima, dan seberapa baik program tersebut berjalan. PKH berfokus pada membantu keluarga miskin dan mereka yang membutuhkan dan tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Nursuhayla dkk., 2025). DTKS diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS. DTKS adalah sistem yang menghimpun, menggabungkan, dan melacak data sosial dari berbagai sumber. Data ini membantu mengidentifikasi siapa yang seharusnya menerima bantuan sosial di Indonesia. Kementerian Sosial bertanggung jawab mengelola DTKS, dan Dinas Sosial di tingkat kabupaten dan kota sebagai pelaksana di seluruh Indonesia (Lasari dan Ali, 2024).

Sistem DTKS sebagai data utama penerima bantuan sosial belum sepenuhnya valid. Dalam pelaksanaannya, DTKS masih mengalami beberapa permasalahan seperti saat memasukkan data, sering kali terdapat masalah seperti informasi data yang tidak konsisten, pencatatan yang salah, dan data yang tidak tepat. Dalam beberapa kasus, individu atau keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak dimasukkan ke dalam sistem, yang menyebabkan bantuan diberikan kepada orang yang salah (*exclusion error*) sehingga menyebabkan penyaluran bantuan menjadi tidak tepat sasaran, sebaliknya ada juga kasus di mana orang yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan secara keliru dimasukkan sebagai penerima (*inclusion error*) (Dwiarto, 2023). Masih ditemukan data penerima bansos yang ternyata telah meninggal dunia namun masih tercatat pada data dan tidak sedikit temuan di lapangan bahwa penerima bantuan sosial ternyata adalah orang yang seharusnya tidak berhak menerima, ada PNS, Kepala Desa, bahkan Direktur (Ombudsman RI, 2024).

Menurut Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, terdapat ketidakakuratan dalam data tentang mereka yang menerima bantuan sosial, dengan lebih dari 1,9 juta keluarga mendapatkan bantuan meskipun mereka tidak memenuhi syarat, yang termasuk dalam kategori *inclusion error* (PANRB, 2025). Dari total yang disebutkan, 616.367 diantaranya adalah keluarga penerima manfaat dari bantuan PKH dan bantuan yang tidak tepat sasaran ini dapat mencapai antara

Rp14 hingga Rp17 triliun yang tidak langsung menunjuk kepada mereka yang membutuhkan (Info Hukum, 2025)

Selain itu, permasalahan keberadaan data ganda dalam sistem DTKS terjadi karena tidak semua pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota secara rutin melakukan pembaruan data DTKS (Dwiarto, 2023). Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Keuangan yang menyoroti bahwa lemahnya pembaruan data serta keterbatasan kapasitas verifikasi di lapangan menjadi penyebab utama tidak akuratnya distribusi bantuan sosial di berbagai daerah (Nursuhayla dkk., 2025). Ketidakakuratan dan ketidakmutakhiran data dalam DTKS dapat berdampak pada keterlambatan serta ketidaktepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai respon atas berbagai permasalahan pada DTKS, pemerintah menetapkan kebijakan pengembangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 sebagai langkah strategis dan bersifat transformatif. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Kementerian Sosial kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang DTSEN yang secara resmi menggantikan regulasi mengenai DTKS. DTSEN ini ditetapkan untuk menggantikan peran DTKS sebagai basis utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan ini ditujukan untuk menyatukan berbagai sumber data sosial dan ekonomi yang selama ini terpisah, seperti DTKS milik Kementerian Sosial, data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang disusun oleh TNP2K dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) (Setyanto, 2025).

DTSEN bersifat dinamis, karena setiap hari bisa saja terjadi perubahan data akibat adanya warga yang wafat, lahir, atau pindah domisili. Karena itu, daftar penerima manfaat bansos pun dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini (Tempo, 2025). DTSEN disusun untuk memberikan penilaian yang lebih tepat terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, dengan menitikberatkan pada identifikasi kelompok miskin ekstrem melalui indikator yang lebih menyeluruh, seperti pendapatan, kondisi hunian, fasilitas sanitasi, hingga akses terhadap air bersih (Info Hukum, 2025). DTSEN merekam data lengkap terkait individu maupun keluarga yang berada dalam kategori miskin dan rentan miskin di seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian dijadikan dasar dalam penyaluran berbagai program sosial dan ekonomi pemerintah, termasuk PKH.

Untuk mengetahui kategori keluarga miskin, kebijakan DTSEN mengelompokkan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya melalui pengelompokan desil. Desil dalam DTSEN membagi data kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok, mulai dari desil 1 miskin ekstrim hingga desil 10 paling sejahtera (Info Hukum, 2025). Hanya masyarakat dengan kategori desil rendah yaitu desil 1 sampai desil 4 yang berhak mendapatkan bansos PKH. Melalui pendataan kemiskinan yang akurat dan terintegrasi, menjamin bahwa bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang paling membutuhkan sehingga pelaksanaan program dapat memberikan dampak maksimal dalam menurunkan angka ketidakakuratan penerima bantuan.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa keberhasilan PKH sangat bergantung pada keakuratan data penerima manfaat. DTKS sebagai basis data nasional sebelumnya menghadapi sejumlah masalah sehingga pemerintah melakukan transformasi kebijakan menuju DTSEN. Transformasi kebijakan pendataan sosial melalui penerapan DTSEN tentu tidak hanya menjadi perubahan teknis dalam pengelolaan data tetapi juga merupakan bentuk implementasi kebijakan publik. Keberhasilan kebijakan DTSEN ini sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Untuk menganalisis proses kebijakan secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Wahab (2012). Model ini memandang bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa variabel, yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, variabel di luar kebijakan dan proses implementasinya. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Transformasi Sistem Pendataan Sosial dalam Program Keluarga Harapan di Kementerian Sosial Republik Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana implementasi kebijakan transformasi sistem pendataan dari DTKS ke DTSEN dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima PKH?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

Menganalisis implementasi kebijakan transformasi sistem pendataan DTKS ke DTSEN dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima PKH.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menambah wawasan mengenai studi implementasi kebijakan khususnya memahami transformasi sistem pendataan sosial dari DTKS ke DTSEN dalam mendukung ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial, khususnya PKH.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi Instansi terkait dalam menyempurnakan sistem pendataan sosial DTSEN dalam mendukung ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial, khususnya PKH, baik di tingkat pusat maupun daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan dasar untuk memahami dan mendukung argumen yang diajukan dalam penelitian ini. Dengan meninjau penelitian terdahulu, peneliti dapat melihat seberapa banyak penelitian yang telah dilakukan pada topik serupa, hasil penelitian apa yang telah ditemukan, dan lokasi mana yang masih membutuhkan lebih banyak penelitian. Selain itu, meninjau penelitian terdahulu membantu menghindari pengulangan penelitian yang sama dan menunjukkan di mana penelitian ini relevan dengan apa yang telah diketahui. Oleh karena itu, penelitian terdahulu sangat dibutuhkan untuk menentukan fokus penelitian ini, bagaimana pendekatannya terhadap topik tersebut, dan ide atau kontribusi baru apa yang akan dibawanya.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul	Metode dan Teori	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
1.	Susilawati (2022) Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh	1. Kualitatif 2. Teori Manajemen	Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan DTKS sudah mengikuti prosedur yang berlaku, dimulai dari tahap pengajuan data, verifikasi, validasi, hingga tahap pemanfaatannya. Meski demikian, masih ditemukan sejumlah kendala, salah satunya adalah keterbatasan	Persamaan : Membahas sistem pendataan sosial serta menggunakan pendekatan penelitian kualitatif Perbedaan : Penelitian ini menjelaskan sistem pendataan sosial terbaru. Lokasi penelitian berbeda dan fokus penelitian khusus pada bantuan

No	Penulis dan Judul	Metode dan Teori	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
			jumlah SDM yang menangani DTKS sehingga muncul permasalahan di lapangan, seperti ketidaksesuaian data dengan catatan Disdukcapil, data masyarakat yang belum diperbarui, serta penetapan KPM yang belum sepenuhnya tepat sasaran	sosial PKH. Dari sisi teori, penelitian ini menggunakan teori implementasi Mazmanian dan Sabatier (1983).
2.	Bela Fitriani Saputri, (Saputri, 2024) Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen)	1. Kualitatif 2. Teori PAFHRIER Gason dan Overman	Temuan penelitian memperlihatkan bahwa beberapa fungsi manajemen, seperti manajemen kebijakan, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen hubungan luar, sudah terlaksana dengan baik. Akan tetapi, pada aspek manajemen informasi masih terdapat berbagai kendala. Permasalahan yang muncul antara lain NIK tidak valid, data ganda di Disdukcapil, adanya satu individu yang memiliki dua NIK, ketidaksesuaian alamat dengan kondisi di lapangan, serta data status kematian, disabilitas, dan kehamilan yang belum diperbarui. Hambatan pengelolaan DTKS juga bersumber dari faktor	Persamaan : Membahas sistem pendataan sosial serta menggunakan pendekatan penelitian kualitatif Perbedaan : Menjelaskan sistem pendataan sosial terbaru. Lokasi penelitian berbeda dan fokus penelitian khusus pada bantuan sosial PKH. Dari sisi teori, penelitian ini menggunakan teori implementasi Mazmanian dan Sabatier (1983)

No	Penulis dan Judul	Metode dan Teori	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
			internal, yakni kapasitas operator SIKS-NG di desa yang belum optimal, serta faktor eksternal, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperbarui dan melaporkan data kependudukan mereka	
3.	Putri, Nadya Ardhika Erhan and Dr. Niken Lastiti, V.A., SAP, MAP and Nurjati Widodo, S.AP., M.AP (Putri, 2024)	1. Kualitatif 2. Teori Implementasi Charles O Jones	Hasil temuan menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan DTKS di Kabupaten Ponorogo masih menghadapi kendala, seperti kurang meratanya sosialisasi, keterbatasan anggaran, serta masih ditemukannya ketidaksesuaian data masyarakat yang menyebabkan distribusi bantuan kurang tepat.	Persamaan : Membahas sistem pendataan sosial, serta menggunakan pendekatan penelitian kualitatif Perbedaan : Menjelaskan sistem pendataan sosial terbaru. Lokasi penelitian berbeda dan fokus penelitian khusus pada bantuan sosial PKH. Dari sisi teori, penelitian ini menggunakan teori implementasi Mazmanian dan Sabatier (1983)
4.	Shintia Ceni Permata, Dadan Kurnia, Zaenal Abidin (Permata dkk., 2025)	1. Kualitatif 2. Teori Implementasi George Edward III	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi DTKS masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta lemahnya koordinasi	Persamaan : Membahas sistem pendataan sosial, serta menggunakan pendekatan penelitian kualitatif Perbedaan : Menjelaskan sistem pendataan sosial terbaru. Lokasi

No	Penulis dan Judul	Metode dan Teori	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
	Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung		antara pelaksana. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya proses verifikasi dan validasi data sehingga penyaluran bantuan sosial belum sepenuhnya tepat sasaran.	penelitian berbeda dan fokus penelitian khusus pada bantuan sosial PKH. Dari sisi teori, penelitian ini menggunakan teori implementasi Mazmanian dan Sabatier (1983)
5.	Widya Setyanto (Setyanto, 2025) Data Tunggal Sosial Ekonomi, Penurunan Kemiskinan, Dan Pembangunan Berkelanjutan : Pengalaman Indonesia	Kualitatif	Temuan mengindikasikan bahwa walaupun terdapat komitmen politik yang cukup kuat, implementasi kebijakan ini masih menghadapi hambatan, baik secara struktural maupun teknis. Kendala tersebut meliputi belum optimalnya proses pembaruan data, keterbatasan integrasi antar sistem digital, dan minimnya penggunaan data dalam perencanaan pembangunan.	Persamaan : Menjelaskan sistem pendataan sosial terbaru. Perbedaan : Lokasi penelitian berbeda dan fokus penelitian khusus pada bantuan sosial PKH.

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki relevansi dengan sejumlah penelitian sebelumnya yang membahas sistem pendataan sosial. Namun demikian, penelitian ini menghadirkan pembaruan dengan menyoroti celah yang belum banyak diteliti, yakni implementasi sistem pendataan sosial terbaru yaitu DTSEN. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan perspektif teori implementasi Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Wahab (2012) untuk menganalisis proses penerapan kebijakan pendataan DTSEN. Selain itu, penelitian ini dilakukan di

Kementerian Sosial, yang menjadi pembeda signifikan dari penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada wilayah lain. Penelitian ini juga menelaah bagaimana penerapan DTSEN berkontribusi terhadap ketepatan sasaran penerima PKH. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus mengisi celah penelitian yang masih terbatas, khususnya terkait implementasi pendataan sosial terbaru dalam mendukung ketepatan distribusi bantuan sosial PKH.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan adalah rangkaian alternatif yang dibuat dan dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan merupakan suatu hasil analisis mendalam terhadap berbagai alternatif yang tujuan akhirnya adalah memilih alternatif yang terbaik (Pasolong, 2019). Dunn (1994) dalam Pasolong (2019), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kumpulan alternatif tindakan yang saling terkait, yang ditetapkan oleh pejabat atau lembaga pemerintah dalam lingkup tugas pemerintahan, mencakup sektor pertahanan dan keamanan, energi, layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kriminalitas, perkotaan, dan bidang-bidang lainnya. Dye (1981) dalam Pasolong (2019), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dilakukan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, pemerintah memutuskan untuk bertindak, tindakan tersebut harus didasarkan pada tujuan tertentu dan kebijakan publik tidak hanya berupa pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat, melainkan mencakup semua bentuk tindakan nyata yang dilakukan pemerintah. Menurut Anderson (1979) dalam Pasolong (2019), proses kebijakan publik dapat dibagi ke dalam beberapa tahap yaitu :

1. Merumuskan masalah
2. Formulasi kebijakan
3. Pengambilan keputusan atau penetapan kebijakan
4. Implementasi kebijakan
5. Evaluasi terhadap kebijakan

2.2.2 Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1978) dalam Kasmad (2018), *“Policy implementation refers to the actions taken by individuals or groups, whether from the public or private sector, aimed at achieving the objectives set out in previous policy decisions”*. Implementasi kebijakan dipahami sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Proses ini menekankan pada penerjemahan keputusan formal menjadi langkah-langkah nyata yang dapat menghasilkan perubahan sesuai dengan arah kebijakan yang telah dirumuskan. Edward III (1980) dalam Kadji (2015). mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai aspek yang memiliki peran sentral dalam kajian administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan dipahami sebagai tahap dalam proses kebijakan yang berlangsung setelah suatu kebijakan ditetapkan baik melalui pengesahan undang-undang, penerbitan keputusan eksekutif, putusan pengadilan, maupun regulasi hingga pada akhirnya menghasilkan dampak nyata terhadap kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Wahab (2012) mengemukakan implementasi kebijakan biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau Keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau Keputusan badan peradilan. Lazimnya, Keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagi cara untuk mengatur proses implementasinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau gagal menyelesaikan masalah yang menjadi alasan pembuatannya, maka kebijakan itu cenderung gagal, meskipun diimplementasikan dengan baik. Sebaliknya, sebuah kebijakan yang baik jika dijalankan secara buruk juga dapat gagal mencapai tujuan yang diharapkan oleh perancangannya (Kadji, 2015).

Menurut Jones (1996) dalam Kasmad (2018) implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan yang menekankan efektivitas, di mana seluruh

aktivitas program dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sehingga memberikan manfaat bagi kelompok sasaran yang dituju. Sementara menurut Anderson (1990) dalam Kasmad (2018) melihat implementasi sebagai pelaksanaan hukum, di mana berbagai aktor, organisasi, pelaksana, serta beragam teknik berkolaborasi untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan tujuan mencapai sasaran kebijakan maupun program. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas yang dijalankan secara efektif dan melibatkan banyak pihak untuk memastikan manfaat kebijakan benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran.

2.2.3 Model-model Implementasi Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan, terdapat beberapa model implementasi yang dapat digunakan, model-model implementasi adalah sebagai berikut :

1. Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier (1983)

Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Wahab (2012) mengembangkan kerangka implementasi kebijakan dengan mengidentifikasi 3 variabel yaitu sebagai berikut :

a. Karakteristik dari masalah

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Wahab (2012), setiap kebijakan memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda dalam hal sejauh mana masalah yang dihadapi dapat dikendalikan melalui tindakan administratif dan regulatif.

- 1) Tingkatan Kesulitan Teknis dari Masalah. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat kompleksitas teknis yang melekat pada program tersebut.
- 2) Keragaman Perilaku kelompok sasaran. Semakin beragam perilaku masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan atau semakin bervariasi jenis layanan publik yang diberikan, maka semakin kompleks pula upaya pemerintah dalam merumuskan aturan yang tegas, seragam, dan mudah diterapkan.

- 3) Proporsi sasaran terhadap total populasi. Semakin kecil dan semakin terdefinisi dengan jelas kelompok masyarakat yang menjadi target suatu program, maka semakin mudah pula kebijakan tersebut diimplementasikan.
 - 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Semakin besar skala perubahan perilaku yang diharapkan dari kelompok sasaran, maka semakin kompleks pula proses implementasinya. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan dari pada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.
- b. Karakteristik kebijakan undang-undang
- Setiap kebijakan baik yang berbentuk undang-undang, keputusan pengadilan, maupun peraturan pemerintah memiliki potensi untuk mengatur jalannya implementasi agar lebih efisien dan terarah.
- 1) Kejelasan isi kebijakan. Tujuan yang dirumuskan secara jelas, rinci, dan disusun berdasarkan tingkat prioritasnya akan sangat membantu keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
 - 2) Teori Kausalitas yang Digunakan. Teori kausalitas berfungsi sebagai dasar konseptual yang menggambarkan mekanisme sebab-akibat dari suatu kebijakan, yaitu bagaimana intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dapat menghasilkan perubahan sosial sesuai dengan tujuan program.
 - 3) Besarnya alokasi sumberdaya. Menegaskan bahwa kecukupan dan ketepatan alokasi dana menjadi salah satu indikator utama dalam menilai sejauh mana suatu kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.
 - 4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai instansi pelaksana. efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu menciptakan keterpaduan hierarki antarlembaga pelaksana agar seluruh unit birokrasi memiliki arah tindakan yang konsisten dan sejalan dengan tujuan kebijakan.

- 5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. Aturan-aturan ini berperan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap konsisten dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 6) Perekrutan pejabat pelaksana. undang-undang atau peraturan dapat menata mekanisme kelembagaan yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Salah satu strategi yang umum digunakan adalah menugaskan implementasi kepada lembaga baru yang dibentuk khusus untuk melaksanakan program tersebut, sehingga program menjadi prioritas utama lembaga dan menarik partisipasi dari pendukung kebijakan.
- 7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Akses formal ini menunjukkan sejauh mana aktor di luar badan pelaksana, seperti masyarakat, kelompok sasaran, maupun lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, diberi kesempatan untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengawasan dan pengambilan keputusan kebijakan.

c. Variabel di luar kebijakan

Meskipun undang-undang telah menetapkan struktur hukum dan arah kebijakan secara formal, implementasi kebijakan publik tidak sepenuhnya bergantung pada peraturan tertulis. Proses implementasi memiliki dinamika tersendiri yang dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar aspek legal, yang biasa disebut sebagai variabel *non-statutoris* atau *non-legal variables*.

- 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan publik, karena perbedaan waktu, wilayah, dan tingkat kemajuan antar daerah dapat menimbulkan variasi hasil kebijakan meskipun kebijakan yang diterapkan sama.

- 2) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. perbedaan tingkat dukungan publik antarwilayah dapat menuntut pembuatan aturan yang fleksibel agar pelaksana di daerah dapat menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal; meskipun demikian, fleksibilitas ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan pelaksanaan dan kesulitan dalam mewujudkan perubahan perilaku yang sistematis. Dalam sistem politik demokratis, publik dapat memengaruhi proses implementasi melalui opini publik dan media massa.
- 3) Sikap dari kelompok masyarakat (*constituency groups*). Keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan atau kapasitas birokrasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sikap, dukungan, dan sumber daya kelompok masyarakat yang terlibat atau terdampak oleh kebijakan tersebut. Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain: 1) Kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan, 2) Kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislative.
- 4) Dukungan dari lembaga-lembaga atasan. Koordinasi antar lembaga sering menghadapi tantangan, terutama dalam kebijakan lintas sektor atau antara pemerintah pusat dan daerah, di mana perbedaan arah kebijakan dan loyalitas aparat terhadap pejabat daerah dapat menimbulkan konflik dan mengurangi efektivitas implementasi.
- 5) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Faktor ini termasuk karakteristik lembaga pelaksana yang menentukan kapasitas birokrasi untuk mencapai tujuan kebijakan. Pejabat dengan komitmen tinggi dan kemampuan kepemimpinan

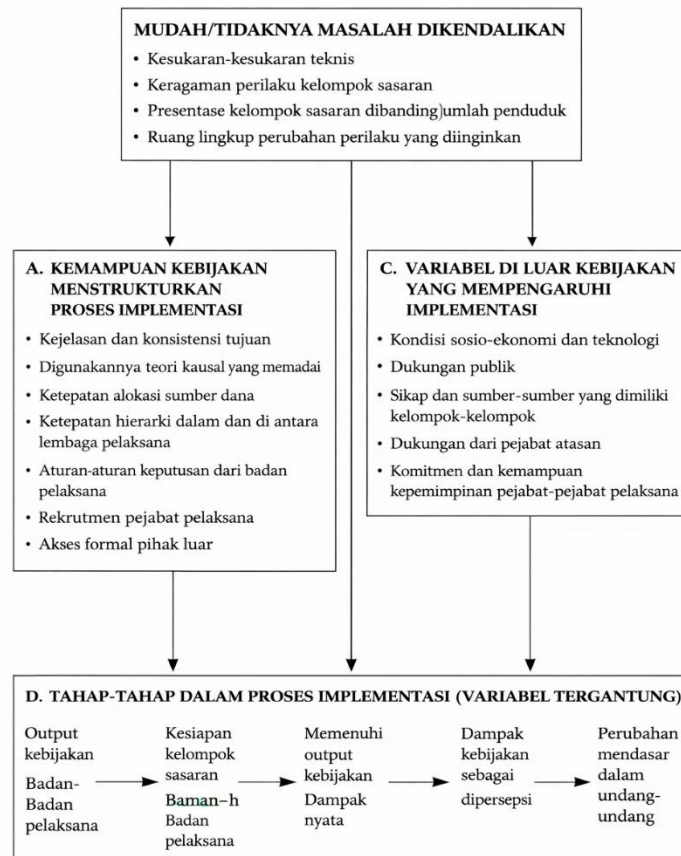
yang kuat mampu menavigasi hambatan politik, administratif, dan sosial, sementara pejabat yang pasif atau kurang kompeten berpotensi membuat kebijakan kehilangan arah implementatifnya.

d. Tahap-tahap Dalam Proses Implementasi

Proses implementasi kebijakan publik dapat dianalisis melalui serangkaian tahapan yang saling terkait, yang masing-masing dapat dianggap sebagai variabel tergantung sekaligus input bagi tahap berikutnya.

- 1) Output kebijakan badan-badan pelaksana. merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam proses implementasi kebijakan publik, karena pada tahap inilah tujuan-tujuan undang-undang diterjemahkan ke dalam keputusan, aturan, dan prosedur teknis yang bersifat operasional.
- 2) Kepatuhan kelompok sasaran terhadap output-output kebijakan. Tingkat kepatuhan individu atau kelompok terhadap peraturan sangat bergantung pada pertimbangan rasional atas untung-rugi (*cost-benefit*) dari tindakan kepatuhan tersebut.
- 3) Dampak nyata output-output kebijakan. Suatu kebijakan atau peraturan dapat dikatakan efektif apabila hasil yang dihasilkan oleh badan pelaksana sejalan dengan tujuan formal yang telah digariskan dalam undang-undang. Keberhasilan ini juga bergantung pada tingkat kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan tersebut serta kejelasan teori kausalitas yang mendasari hubungan antara perubahan perilaku kelompok sasaran dengan pencapaian tujuan kebijakan.
- 4) Persepsi terhadap dampak output kebijakan. Persepsi seseorang terhadap dampak kebijakan tidak selalu bersifat objektif, melainkan dipengaruhi oleh nilai-nilai, pengalaman, serta sikap awal individu atau kelompok terhadap kebijakan tersebut. Dengan demikian, terdapat korelasi yang kuat antara sikap awal terhadap suatu kebijakan dengan evaluasi terhadap dampaknya.

- 5) Perbaikan mendasar dalam undang-undang. Revisi atau reformulasi undang-undang dipahami sebagai tahap kulminasi dari proses implementasi, meskipun proses tersebut sering kali bersifat berulang dan berlangsung secara berkesinambungan.



Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983)

Sumber : Wahab, 2012

2. Model Implementasi Merilee S. Grindle (1980)

Grindle (1980) mengatakan bahwa hal-hal yang memengaruhi bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan adalah isi kebijakan dan lingkungan di mana kebijakan tersebut diterapkan.

1) *Content* atau isi kebijakan

Konten kebijakan adalah isi atau substansi dari suatu kebijakan atau program yaitu apa yang ingin dicapai, siapa yang menjadi sasaran, jenis manfaat yang diberikan, serta sejauh mana kebijakan itu

mengubah perilaku atau struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Adapun beberapa poin yang terkandung dalam *content* adalah sebagai berikut:

- a. *Interest affected*. Faktor utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan adalah kepentingan yang terkandung di dalamnya. Grindle (1980) menegaskan bahwa implementasi kebijakan tidak pernah berada dalam ruang yang netral, melainkan selalu dipengaruhi oleh interaksi antaraktor dengan kepentingannya masing-masing. Jika kebijakan hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu, maka potensi penolakannya tinggi. Sebaliknya, apabila kebijakan mampu mencerminkan kepentingan masyarakat luas, maka dukungan dari kelompok sasaran akan semakin besar sehingga peluang keberhasilannya juga meningkat.
- b. *Type of benefits*. Grindle (1980) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena hal ini akan mendorong lahirnya dukungan yang luas. Namun, jika kebijakan hanya memberikan sedikit manfaat, maka potensi penolakan atau minimnya dukungan dari kelompok sasaran akan lebih besar.
- c. *Extent of change envisioned*. Derajat perubahan dalam teori Grindle (1980) merujuk pada skala transformasi yang dihasilkan oleh kebijakan, baik dalam perilaku aktor maupun kondisi sosial-ekonomi. Semakin besar perubahan yang diharapkan dari suatu kebijakan, semakin kompleks pula tantangan yang dihadapi dalam tahap implementasinya. Dengan demikian, kebijakan yang bertujuan menciptakan perubahan besar umumnya lebih sulit untuk diwujudkan secara optimal.
- d. *Site of decision making*. Letak pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan publik memengaruhi kecepatan respons dan ketepatan strategi yang diambil. Grindle (1980) menekankan

bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada siapa yang mengambil keputusan kapan keputusan diambil, dan bagaimana keputusan itu disosialisasikan ke tingkat bawah. Apabila keputusan diambil terlalu jauh dari konteks dan kebutuhan masyarakat sasaran, maka peluang kegagalan implementasi akan semakin besar. Sebaliknya, keputusan yang dekat dengan realitas kelompok sasaran cenderung lebih mudah diimplementasikan.

- e. *Program implementors*. Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas para pelaksananya. Apabila implementor memiliki kompetensi yang memadai serta komitmen yang tinggi, maka kebijakan tersebut cenderung dapat diwujudkan secara efektif.
- f. *Resources committed*. Sumber daya yang memadai, baik berupa sumber daya manusia, finansial, maupun sarana prasarana, merupakan elemen kunci dalam mendukung implementasi kebijakan. Kekurangan dalam salah satu aspek sumber daya tersebut dapat menjadi penghambat yang signifikan sehingga mengurangi efektivitas pelaksanaan dan berpotensi mengakibatkan kegagalan kebijakan.

2) *Context* atau lingkungan kebijakan

Konteks kebijakan adalah lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan kelembagaan di mana kebijakan itu diimplementasikan. Konteks menentukan siapa yang terlibat, bagaimana kekuasaan dan sumber daya didistribusikan, serta sejauh mana birokrasi dan aktor politik dapat menjalankan kebijakan tersebut secara efektif. Adapun beberapa poin yang terkandung dalam *context* adalah sebagai berikut:

- a. *Power, interests, and strategies of actor involved*. Aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Hal ini bergantung pada sejauh mana mereka memiliki kekuatan, kepentingan, serta strategi yang tepat dalam mendukung tercapainya tujuan kebijakan.

b. Institution and regime characteristics. Keberhasilan suatu kebijakan juga ditentukan oleh dukungan institusi serta rezim yang berkuasa, yang bervariasi sesuai dengan karakteristik rezim tersebut.

c. Compliance and responsiveness. Suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila terdapat keselarasan antara tujuan dengan bentuk program yang dirancang. Hal ini semakin diperkuat apabila para implementor memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan tersebut.

3. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn (1975)

Model ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik (Kadji, 2015). Beberapa variabel yang mempengaruhi menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Kasmad (2018) adalah sebagai berikut.

a. Komunikasi

Kejelasan standar dan tujuan kebijakan tidak serta-merta menjamin efektivitas implementasi apabila tidak didukung oleh komunikasi yang memadai di antara para pelaksana. Seluruh implementor perlu memiliki pemahaman yang utuh terhadap prinsip-prinsip dasar kebijakan, mengingat mereka memegang tanggung jawab langsung atas pelaksanaannya. Dalam konteks organisasi publik, peran kepemimpinan menjadi krusial untuk memastikan tersampainya komunikasi kebijakan secara efektif serta menciptakan iklim kerja yang kondusif sehingga aparat pelaksana memiliki kapasitas dan motivasi yang diperlukan guna memenuhi tuntutan kebijakan.

b. Karakteristik dan agen pelaksana/implementor,

Struktur organisasi lembaga pelaksana, beserta karakteristik, norma, dan pola relasinya, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam hal ini mencakup kapasitas kelembagaan yang tercermin dari kompetensi serta jumlah sumber daya manusia yang

tersedia, tingkat kendali hierarkis atas unit-unit organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan, ketersediaan sumber daya politik, termasuk dukungan dari lembaga legislatif maupun eksekutif, vitalitas dan dinamika internal organisasi, keterbukaan sistem komunikasi, baik secara horizontal maupun vertikal, serta dengan aktor eksternal sebagai bentuk jejaring informasi, dan kualitas hubungan formal maupun informal dengan badan pembuat kebijakan serta otoritas pelaksana lainnya.

c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Faktor ekonomi, sosial, dan politik merupakan determinan penting yang harus diperhitungkan dalam proses implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya ekonomi menjadi prasyarat utama bagi efektivitas pelaksanaan, karena tanpa dukungan yang memadai kebijakan sulit diwujudkan secara optimal. Aspek sosial, mengingat kebijakan publik senantiasa menysasar kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan perhatian khusus. Selain itu, dinamika politik, termasuk keberadaan dan pengaruh kelompok kepentingan, perlu dipertimbangkan baik pada tahap perumusan maupun implementasi, karena dapat memengaruhi arah, dukungan, serta legitimasi kebijakan di tingkat praktis.

d. Disposisi dari pelaksana/ implementor.

Hal penting keempat yang perlu dipertimbangkan ketika menerapkan suatu kebijakan adalah bagaimana perasaan orang-orang yang melaksanakannya. Setiap bagian dari model yang disebutkan sebelumnya akan membahas cara pandang orang-orang tersebut. Tiga hal memengaruhi hal ini yaitu seberapa baik mereka memahami kebijakan tersebut, apakah mereka setuju atau tidak, dan seberapa kuat perasaan mereka terhadapnya.

4. Model Implementasi Hoogwood dan Lewis A. Gun (1978)

Model ketiga adalah model yang dikemukakan oleh Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun (1978) sebagaimana dikutip dalam Kadji (2015) yang

menyatakan bahwa penerapan suatu kebijakan memerlukan beberapa kondisi, yaitu :

- a. Memastikan bahwa faktor eksternal tidak akan menimbulkan masalah besar bagi lembaga yang melaksanakan pekerjaan.
- b. Memeriksa apakah tersedia cukup waktu dan sumber daya untuk melaksanakan rencana.
- c. Memastikan bahwa kombinasi sumber daya yang tepat benar-benar tersedia.
- d. Memastikan bahwa kebijakan dibangun di atas hubungan sebab-akibat yang solid.
- e. Melihat berapa banyak hubungan sebab-akibat yang ada, karena semakin sedikit hubungan sebab-akibat, biasanya akan menghasilkan hasil yang lebih baik dari kebijakan tersebut.
- f. Memeriksa apakah tidak terdapat terlalu banyak hubungan antar bagian.
- g. Memastikan semua orang sepenuhnya memahami dan menyetujui tujuan, serta tugas-tugas diuraikan dengan jelas dan dalam urutan yang benar.
- h. Memastikan bahwa komunikasi dan kerja sama tim berjalan dengan sempurna.
- i. Memastikan bahwa mereka yang berwenang dapat menegakkan kepatuhan penuh terhadap rencana.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Wahab (2012) dibandingkan dengan model lain. Pemilihan model ini didasarkan pada pertimbangan bahwa model tersebut mampu memberikan kerangka analisis yang sistematis dan terstruktur dalam memahami proses implementasi kebijakan publik. Model ini menekankan tiga kelompok variabel utama, yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, serta variabel di luar kebijakan atau *nonstatutory* yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks kebijakan transformasi sistem pendataan sosial dari DTKS ke DTSEN, model Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Wahab (2012) dianggap relevan karena kebijakan ini

merupakan kebijakan nasional yang bersifat *top-down* dan memiliki struktur hukum yang jelas melalui Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025.

Dibandingkan dengan model Grindle (1980), model Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Wahab (2012) memberikan fokus yang lebih kuat pada aspek teknokratis dan kemampuan kebijakan dalam membentuk proses implementasi secara terencana. Sementara model Grindle (1980) lebih menitikberatkan pada dinamika politik dan interaksi antaraktor, kebijakan DTSEN tidak menunjukkan adanya konflik kepentingan antaraktor, karena bersumber langsung dari instruksi Presiden dan dijalankan oleh Kementerian Sosial secara hierarkis. Oleh karena itu, pendekatan yang menekankan pada desain kebijakan, kejelasan tujuan, dan faktor-faktor di luar kebijakan seperti yang dijelaskan Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Wahab (2012) dinilai lebih sesuai untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan ini.

Selain itu, model Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Wahab (2012) juga dianggap lebih komprehensif dibandingkan model Van Meter Van Horn (1975) dalam Kasmad (2018) dan Hogwood dan Gunn (1978) dalam Kadji (2015) lebih berfokus pada empat faktor teknis seperti komunikasi, karakteristik dan agen pelaksana, kondisi ekonomi sosial politik, dan disposisi dari pelaksana yang lebih berorientasi pada mekanisme pelaksanaan kebijakan di tingkat pelaksana dan tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas kebijakan berskala nasional. Sementara itu, model Hogwood dan Gunn (1978) dalam Kadji (2015) yang menekankan pada prasyarat implementasi sempurna (*perfect implementation*) dinilai kurang realistis karena mengasumsikan tidak adanya kendala politik, administratif, atau sosial dalam proses pelaksanaan. Dengan pertimbangan tersebut, model Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Wahab (2012) dipilih karena mampu menjelaskan secara sistematis hubungan antara karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan faktor lingkungan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan transformasi sistem pendataan sosial DTSEN.

2.3 Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan salah satu bentuk bantuan sosial tunai bersyarat atau *Conditional Cash Transfer* (CCT). Kementerian Sosial menjelaskan PKH sebagai upaya pengurangan kemiskinan yang dipimpin oleh pemerintah pusat, dengan bantuan dari pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kota (Kamariani dkk., 2024). Diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah berkembang menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang PKH, PKH sebagai program pemberian bantuan sosial bersyarat yang ditujukan secara spesifik kepada keluarga dan/atau seseorang dengan status miskin dan rentan. Agar sah menjadi penerima, calon peserta wajib terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin atau saat ini disebut dengan DTSEN. Tujuan Program Pelaksanaan PKH didasarkan pada sejumlah tujuan strategis, utamanya untuk meningkatkan taraf hidup KPM melalui pembukaan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, program ini bertujuan mengurangi beban pengeluaran sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, serta secara makro berkontribusi mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan. Lebih jauh, PKH dirancang untuk menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan dasar, serta mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada masyarakat penerima bantuan.

Kriteria komponen penerima manfaat PKH meliputi aspek kesehatan yaitu ibu hamil/menyusui dan anak usia 0 hingga 6 tahun, aspek pendidikan yaitu anak yang bersekolah di jenjang SD hingga SMA atau sederajat, serta anak usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, serta aspek kesejahteraan sosial yaitu lanjut usia mulai 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas, dengan prioritas pada disabilitas berat. Di samping kriteria reguler tersebut, terdapat pula kategori PKH Akses yang dikhususkan bagi penduduk di wilayah yang sulit dijangkau, seperti daerah pesisir, pulau kecil, daerah tertinggal atau terpencil, serta wilayah perbatasan antarnegara.

Hak dan Kewajiban KPM Sebagai peserta program, KPM memiliki hak untuk memperoleh PKH, mendapatkan pendampingan sosial, serta mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sosial. KPM juga berhak mendapatkan bantuan komplementer lainnya, seperti subsidi energi atau perumahan. Namun, mengingat PKH adalah bantuan bersyarat, KPM terikat kewajiban untuk memeriksakan kesehatan sesuai protokol (bagi ibu hamil dan balita), memastikan tingkat kehadiran belajar minimal 85% (bagi anak sekolah), serta mengikuti kegiatan pemeliharaan kesehatan (bagi lansia dan disabilitas berat). Kelalaian dalam memenuhi kewajiban-kewajiban ini dapat berujung pada sanksi berupa penangguhan atau penghentian bantuan.

Mekanisme Pelaksanaan Mekanisme pelaksanaan PKH dilakukan melalui tahapan bertingkat yang sistematis, dimulai dari perencanaan dan penetapan calon peserta yang bersumber dari data terpadu, dilanjutkan dengan validasi data oleh Pendamping Sosial untuk mencocokkan data awal dengan kondisi faktual terkini. Setelah penetapan KPM dilakukan, penyaluran bantuan dilaksanakan secara nontunai melalui Bank Penyalur ke rekening KPM menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (Kartu Kombo). Proses ini berjalan beriringan dengan pendampingan sosial dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) minimal sebulan sekali untuk mendorong perubahan perilaku, verifikasi komitmen kehadiran di fasilitas layanan, pemutakhiran data berkala, hingga akhirnya masuk ke tahap transformasi kepesertaan.

Transformasi kepesertaan atau graduasi merupakan mekanisme pengakhiran kepesertaan KPM dalam program PKH. KPM dapat keluar dari program melalui dua jalur, yaitu graduasi alamiah apabila KPM tidak lagi memiliki komponen kepesertaan yang dipersyaratkan (misalnya anak sudah lulus sekolah atau tidak ada lagi balita), atau graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi apabila status ekonomi keluarga telah meningkat dan tidak lagi tergolong miskin. Sebelum benar-benar dilepas dari program, KPM yang kondisi ekonominya membaik namun masih memenuhi komponen syarat dapat memasuki masa transisi untuk dipersiapkan kemandiriannya secara berkelanjutan.

2.4 Sistem Pendataan Sosial

2.4.1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021, DTKS adalah data induk yang memuat informasi komprehensif mengenai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Keberadaan DTKS berfungsi sebagai dasar acuan utama dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang bertujuan agar pengelolaan bantuan dapat berjalan dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan.

Ruang Lingkup Data Ruang lingkup data dalam DTKS mencakup tiga komponen utama, yaitu PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta PSKS. Data yang terhimpun di dalamnya meliputi berbagai entitas, mulai dari perseorangan, keluarga, kelompok, hingga masyarakat luas. Untuk masuk ke dalam DTKS, terdapat kriteria spesifik yang ditetapkan oleh Menteri. Kriteria tersebut mencakup kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, serta ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku. Selain itu, cakupan kriteria juga meliputi mereka yang menjadi korban bencana, serta korban dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Kemudian tahapan pengelolaan DTKS dilaksanakan melalui empat tahapan utama. Tahap pertama adalah proses usulan serta verifikasi dan validasi, di mana usulan data baru atau perbaikan dapat diajukan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan, usulan Kementerian Sosial dalam kondisi darurat, atau pendaftaran mandiri via aplikasi SIKS-NG, yang kemudian wajib diverifikasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Tahap kedua adalah pengendalian kualitas, yang dilakukan jika ditemukan ketidaksesuaian data, dengan kemungkinan melibatkan perguruan tinggi. Tahap ketiga adalah penetapan, di mana data yang valid ditetapkan oleh Menteri setiap bulan, jika tidak ada perubahan, penetapan bulan terakhir tetap berlaku. Tahap terakhir adalah penggunaan, di mana DTKS dijadikan acuan program oleh Kementerian Sosial, lembaga lain, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

Syarat integritas data agar data usulan dapat ditetapkan dalam DTKS, data tersebut wajib memenuhi syarat integritas data yang ketat. Syarat-syarat ini meliputi kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, dan alamat dengan data Dukcapil, serta data harus bersifat individual, tunggal (tidak ganda), dan data keluarga merupakan himpunan dari data perorangan. Apabila data dinilai tidak memenuhi standar integritas ini, Kementerian Sosial berhak mengembalikan data tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan perbaikan. DTKS merupakan sistem pendataan yang digunakan untuk mendata penerima bantuan sosial sebelum DTSEN diresmikan.

2.4.2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025, DTSEN sebagai basis data tunggal yang merekam informasi individu dan keluarga, mencakup kondisi sosial, ekonomi, serta peringkat kesejahteraan keluarga. Integritas data DTSEN terbentuk melalui penggabungan tiga sumber data utama yang telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala. Ketiga sumber data tersebut meliputi Regsosek, DTKS, dan Data P3KE, yang disatukan untuk menciptakan satu data yang komprehensif. Dalam tatanan pengelolaannya, terdapat pembagian peran yang distinktif antar lembaga agar integritas data tersebut terjaga. BPS memegang tanggung jawab utama dalam mengelola basis data induk DTSEN serta melaksanakan pemeringkatan kesejahteraan. Sementara itu, di sisi lain, Menteri Sosial bertanggung jawab dalam aspek pemutakhiran DTSEN, yang dilakukan secara berkelanjutan melalui mekanisme sinkronisasi terhadap usulan data baru ataupun perbaikan data yang masuk ke dalam sistem.

Salah satu fitur fundamental yang dihasilkan oleh lembaga statistik dalam pengelolaan ini adalah adanya Peringkat Kesejahteraan Keluarga, yaitu urutan tingkat kesejahteraan yang disusun berdasarkan variabel sosial ekonomi. Pemeringkatan ini dilakukan menggunakan metode statistik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun, agar sebuah keluarga dapat diperingkat secara akurat, atribut data yang diserahkan pada saat proses usulan data harus memenuhi syarat kelengkapan ketat yang telah ditetapkan.

Guna memastikan akurasi pemeringkatan dan validitas data tersebut, proses pemutakhiran dalam ekosistem DTSEN dilaksanakan melalui mekanisme yang disebut sinkronisasi DTSEN. Mekanisme ini mencakup tahapan pengusulan yang bersumber dari Pemerintah Daerah, unit kerja internal Kementerian Sosial, maupun partisipasi masyarakat, yang kemudian wajib melalui verifikasi dan validasi (verval) berjenjang. Proses verval dimulai dari Bupati/Wali Kota melalui aplikasi SIKS-NG, hingga verifikasi integritas data oleh Menteri di tingkat pusat untuk memastikan kesesuaian NIK dan ketunggalan data. Data yang telah dinyatakan valid atau bersih kemudian diserahkan oleh Menteri kepada BPS untuk dilakukan pemutakhiran dan pemeringkatan ulang.

Sebagai hasil akhir dari proses pengelolaan yang ketat tersebut, DTSEN diposisikan sebagai acuan utama dalam pelaksanaan berbagai program strategis, meliputi bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya. Akses penggunaan data ini terbuka bagi berbagai pihak, mulai dari internal Kementerian Sosial, Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, hingga masyarakat luas. Meskipun terbuka, demi menjaga keamanan dan ketertiban data, penggunaan oleh pihak eksternal wajib didahului dengan permohonan tertulis dan mendapatkan persetujuan resmi dari Menteri.

Selanjutnya, dalam kerangka regulasi masa transisi, aturan baru menetapkan bahwa DTKS yang telah ada sebelumnya harus dimaknai sebagai DTSEN, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kondisi di mana DTSEN belum sepenuhnya dimutakhirkan, Menteri memiliki kewenangan diskresi untuk menggunakan DTSEN periode sebelumnya sebagai acuan sementara, dengan tetap mengakomodasi perubahan data kependudukan dan dinamika sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat

2.4.3 Dinamika Perubahan Sistem Pendataan Sosial

Sistem pendataan sosial di Indonesia telah banyak berubah seiring waktu untuk memenuhi kebutuhan akan data yang akurat, andal, dan bertanggung jawab. Perubahan ini berkaitan erat dengan pentingnya data dalam

merumuskan kebijakan dan memastikan program bantuan sosial menjangkau masyarakat yang tepat. Sejak awal tahun 2000-an, pemerintah, melalui BPS dan Kementerian Sosial, terus berupaya meningkatkan cara pengumpulan data dengan memanfaatkan teknologi terkini, dan melibatkan berbagai kelompok seperti pemerintah daerah dan masyarakat. Upaya berkelanjutan ini telah melalui berbagai tahapan, mulai dari metode pendataan awal hingga pembentukan DTKS, yang kemudian menjadi DTSEN. Adapun dinamika perubahan system pendataan sosial di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Sistem Informasi Desa Resing Bat (Sistem Informasi Desa Rensing Bat, 2022) adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2005, BPS menyelenggarakan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE), yang merupakan sensus ekonomi pertama di Indonesia. Sensus ini bertujuan untuk mengidentifikasi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin (RTM), dan Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM). Hasil sensus ini membantu memulai dua program bantuan sosial yaitu BLT dan PKH. PKH dimulai pada tahun 2007 dan awalnya menjangkau sekitar 500.000 keluarga RTSM di tujuh provinsi. Hal ini menandai dimulainya penggunaan data sosial secara terstruktur untuk mendukung program perlindungan sosial.

Pada tahun 2008, data PSE pertama kali diperbarui menggunakan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Pembaruan ini memperbaiki data sehingga memudahkan penyaluran bantuan. Pada tahun 2011, PPLS dilakukan lagi, mencakup lebih banyak orang, termasuk hingga 40% rumah tangga berpenghasilan menengah ke bawah. Data tersebut menggabungkan hasil PSE 2005 dengan Sensus Penduduk 2010 sehingga memberikan informasi yang lebih rinci, seperti nama dan alamat Rumah Tangga Sasaran (RTS). Hasil PPLS 2011 kemudian dibagikan kepada TNP2K untuk membuat Basis Data Terpadu (BDT). BDT ini menjadi sumber informasi utama untuk berbagai program bantuan sosial antara tahun 2012 dan 2014. Selama masa ini, sistem pemeringkatan kemiskinan yang disebut desil (Desil 1–4) diperkenalkan untuk memastikan bahwa bantuan menjangkau kelompok termiskin secara lebih efektif.

Pada tahun 2015, BPS kembali melakukan pemutakhiran data melalui kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT). Salah satu hal baru yang penting dalam PBDT adalah Forum Konsultasi Publik (FKP) yang memungkinkan masyarakat dan kelompok peminat lainnya untuk turut serta dalam pengecekan dan konfirmasi data. Tahun berikutnya, pemutakhiran data tersebut dikaji oleh Tim Kelompok Kerja (pokja) Data yang terdiri dari berbagai instansi dan departemen pemerintah. Pemutakhiran ini secara resmi disahkan melalui Keputusan Menteri Sosial No. 32/HUK/2016, dan jumlah penduduk yang terdaftar dalam sistem mencapai 92.994.742 jiwa. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menempatkan PBDT di bawah Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos). Sejak saat itu, tugas pemutakhiran data diserahkan kepada pemerintah daerah karena dianggap lebih mengenal masyarakatnya.

Pada tahun 2017, inovasi berlanjut dengan diperkenalkannya aplikasi SIKS-NG. Aplikasi ini meningkatkan pengelolaan data dengan menggabungkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM), dan Orang Tidak Mampu (OTM), dan informasi tentang penerima manfaat program perlindungan sosial seperti PKH, Program Beras untuk Fakir Miskin (Rastra), dan BPNT. Pengumpulan data dilakukan dua kali setahun sehingga memudahkan pemutakhiran informasi dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2018, proses ini diubah menjadi setahun sekali berkat Keputusan Menteri Sosial nomor 71/HUK/2018. Saat itu, lebih dari 98 juta jiwa tercatat dalam data berbasis keluarga, dan lebih dari 400 ribu jiwa dalam data non-keluarga. Tahun berikutnya, 2019, data dikumpulkan tiga kali melalui berbagai keputusan, dan jumlahnya berkisar antara 98 hingga 99 juta jiwa. Pada tahun yang sama, Kementerian Sosial menerbitkan Peraturan No. 5 Tahun 2019, yang mengatur pengelolaan DTKS. Peraturan ini menjadikan data tidak hanya mencakup masyarakat termiskin tetapi juga mereka yang membutuhkan dukungan sosial, seperti pengguna layanan kesejahteraan sosial dan mereka yang memiliki potensi atau sumber daya untuk

kesejahteraan sosial. Kebijakan ini menunjukkan bahwa data kini digunakan sebagai alat utama pembangunan sosial. Pada tahun 2020, proses pengumpulan data dilakukan empat kali setahun satu kali pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Kemudian pada tahun 2021, Kementerian Sosial memperbarui peraturan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang DTKS. Sistem ini memiliki kelebihan, seperti mempercepat pendataan, meminimalisir kesalahan, serta menghadirkan informasi sosial-ekonomi yang lebih tepat. Namun, permasalahan masih terjadi, mulai dari data ganda, kesalahan pencatatan, hingga kasus *inclusion error* dan *exclusion error* yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Pada 2025, lebih dari 1,9 juta keluarga tercatat menerima bantuan meski tidak memenuhi syarat.

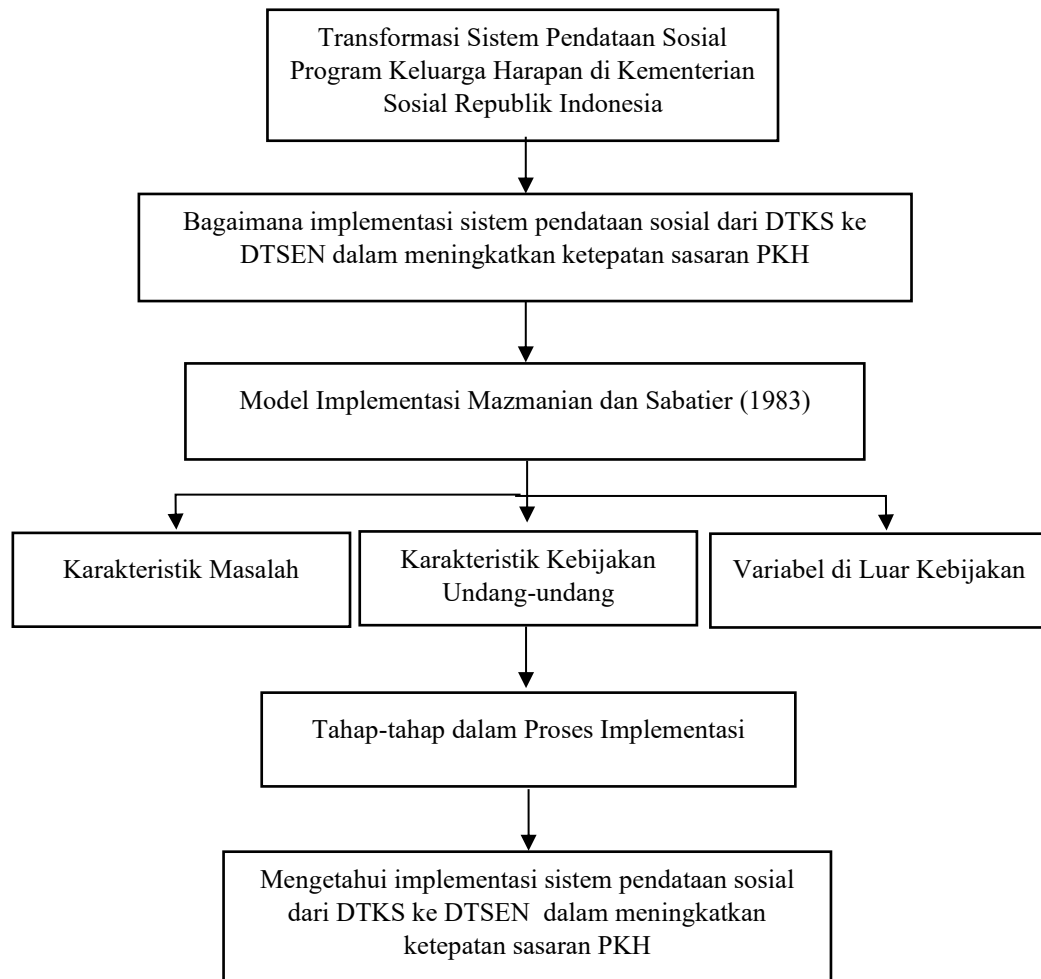
Untuk mengatasi permasalahan yang disebutkan, akhirnya pemerintah meluncurkan DTSEN melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. DTSEN menyatukan berbagai sumber data sosial dan ekonomi seperti DTKS, data P3KE, dan Regsosek menjadi satu platform nasional yang terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan. Dengan indikator yang lebih komprehensif, DTSEN diharapkan mampu mengidentifikasi kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara lebih tepat, terutama kelompok miskin ekstrem. Melalui sistem baru ini, program bantuan sosial termasuk PKH dapat disalurkan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari pentingnya menjaga kemutakhiran data sosial agar bantuan dapat diberikan secara akurat dan menghindari kesalahan data. Melalui pembaruan yang berkelanjutan ini, menjadi jelas bahwa data yang baik sangat penting untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan efektivitas program perlindungan sosial di Indonesia.

2.5 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran (1992) Sugiyono (2023) mengatakan bahwa kerangka pemikiran adalah model yang menunjukkan bagaimana teori terhubung dengan berbagai faktor penting dalam memecahkan suatu masalah. Dalam

penelitian kualitatif, kerangka pemikiran sangat membantu dalam memandu penelitian dan membuatnya lebih jelas. Oleh karena itu, kerangka pemikiran diperlukan untuk membangun konteks dan gagasan penelitian. Kerangka Pemikiran ini membantu menjelaskan latar belakang penelitian, metode yang digunakan, dan bagaimana teori diterapkan. Gagasan yang dikembangkan akan menghubungkan teori dengan isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini.

Kerangka berpikir ini menggambarkan alur penelitian mengenai transformasi sistem pendataan sosial PKH dari DTKS menuju DTSEN. Permasalahan utama yang menjadi fokus adalah bagaimana implementasi kebijakan transformasi sistem pendataan tersebut dilakukan dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat PKH. Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan, penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Wahab (2012) yang terbagi ke dalam tiga variabel yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan undang-undang, dan variabel di luar kebijakan. Dengan menggunakan model ini, penelitian berupaya menjelaskan bagaimana transformasi sistem pendataan sosial dari DTKS ke DTSEN diimplementasikan dalam program PKH, serta menilai sejauh mana kebijakan ini berkontribusi terhadap ketepatan sasaran penerima manfaat PKH. Hasil akhir dari kerangka berpikir ini adalah untuk memahami implementasi kebijakan transformasi sistem pendataan sosial terhadap efektivitas penyaluran bantuan PKH, khususnya terkait ketepatan sasaran penerima yang memang layak mendapatkan bantuan. Adapun kerangka berpikir penelitian adalah sebagai berikut.



Gambar 2. Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber : diolah oleh Peneliti (2025)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Creswell sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (Sugiyono, 2023), penelitian kualitatif adalah cara untuk mengeksplorasi dan memahami makna di balik perilaku individu atau kelompok, serta untuk mendeskripsikan isu-isu sosial atau kemanusiaan. Metode ini didasarkan pada gagasan post-positivisme dan digunakan dalam konteks kehidupan nyata atau alami, bukan dalam eksperimen terkontrol. Dalam jenis penelitian ini, peneliti sendiri merupakan alat utama untuk mengumpulkan informasi, dan mereka menggunakan berbagai metode bersama-sama, seperti triangulasi, untuk mengumpulkan data. Data dianalisis dengan cara yang mencari makna alih-alih mencoba membuat generalisasi yang luas (Sugiyono, 2023). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada pemahaman makna di balik suatu fenomena sosial atau kemanusiaan, dengan cara meneliti objek pada kondisi yang alamiah.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena belum banyak data pendukung yang membahas terkait sistem pendataan sosial yang baru yaitu DTSEN dan bagaimana DTSEN dapat membantu dalam penyaluran PKH. Penelitian kualitatif dipandang paling sesuai untuk menggali informasi secara mendalam sehingga mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana kebijakan ini dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta kontribusinya terhadap ketepatan sasaran PKH.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Mudjia Rahardjo, studi kasus melibatkan pelaksanaan penelitian yang intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu program, acara, atau kegiatan. Subjek penelitian dapat mencakup individu, kelompok, lembaga, atau organisasi, dengan tujuan mencapai pemahaman yang mendalam tentang subjek yang diteliti (Ilhami dkk., 2024). Studi kasus memiliki tujuan yang berbeda pada tiap disiplin ilmu. Dalam psikologi, studi kasus membantu mengungkap perilaku dan proses kognitif individu. Dalam sosiologi, metode ini menelaah interaksi sosial dalam kelompok maupun masyarakat. Sementara dalam eksperimen, studi kasus dapat menghasilkan temuan atau teori baru (Ilhami dkk., 2024).

Pendekatan studi kasus dipilih dalam penelitian ini karena sesuai dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses transformasi sistem pendataan sosial dari DTKS ke DTSEN dalam PKH. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menelaah fenomena tersebut secara intensif, terperinci, dan kontekstual dalam lingkup Kementerian Sosial sebagai lembaga pelaksana kebijakan. Dengan demikian, melalui studi kasus, penelitian ini dapat mengungkap secara komprehensif pengalaman, tantangan, dan praktik terbaik dalam pelaksanaan transformasi pendataan sosial.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan memfokuskan analisis pada implementasi transformasi sistem pendataan sosial dari DTKS menuju DTSEN dan kontribusinya terhadap ketepatan sasaran PKH. Fokus penelitian dijabarkan berdasarkan variabel-variabel dalam teori Mazmanian dan Sabatier sebagai berikut:

1. Karakteristik dari Masalah (*Tractability of the Problems*), yaitu menganalisis tingkatan kesulitan teknis dari masalah, tingkat kemajemukan kelompok sasaran, proporsi sasaran terhadap total populasi, dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dalam implementasi kebijakan DTSEN

2. Karakteristik Kebijakan Undang-Undang (*Ability of Statute to Structure Implementation Process*) yaitu menganalisis sejauh mana kejelasan isi kebijakan, dukungan teoritis terhadap kebijakan, besarnya alokasi sumber daya finansial, keterpautan dan dukungan antar instansi pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan pada badan pelaksana, perekrutan pejabat pelaksana, akses partisipasi kelompok luar dalam implementasi dalam implementasi kebijakan DTSEN.
3. Variabel di Luar Kebijakan (*Nonstatutory Variables Affecting Implementation*) yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap kebijakan, sikap kelompok masyarakat (*constituency groups*), dukungan dari lembaga-lembaga atasan, tingkat komitmen dan keterampilan aparat pelaksana.
4. Tahap-tahap Dalam Proses Implementasi terdiri dari output kebijakan badan-badan pelaksana, kepatuhan kelompok sasaran terhadap output-output kebijakan, dampak nyata output-output kebijakan, persepsi terhadap dampak output kebijakan, perbaikan mendasar dalam undang-undang.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai lokasi utama penelitian. Pemilihan Kemensos didasarkan pada perannya yang strategis sebagai lembaga pemerintah yang memiliki otoritas penuh dalam merumuskan, mengelola, serta mengevaluasi kebijakan di bidang kesejahteraan sosial, termasuk pengelolaan PKH. Selain itu, Kemensos juga menjadi institusi yang bertanggung jawab langsung dalam mengelola DTKS sekaligus sebagai pelaksana transformasi menuju DTSEN. Kementerian Sosial merupakan sumber utama data, informasi, serta kebijakan terkait perubahan sistem pendataan sosial yang sedang diteliti. Oleh karena itu, lokasi ini dianggap paling relevan untuk memberikan gambaran komprehensif terkait transformasi sistem pendataan sosial dalam PKH. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 dan berlangsung selama empat bulan, terhitung mulai dari Agustus 2025 hingga Desember 2025. Rentang waktu

tersebut mencakup seluruh tahapan penelitian, mulai dari tahap pembuatan proposal, pengumpulan data, hingga analisis dan penyusunan hasil penelitian.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengumpulan data di lapangan. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber utama. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi yang dilakukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber lain yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Data ini berasal dari dokumen atau arsip yang terkait dengan topik penelitian. Data ini dapat mencakup peraturan dan kebijakan, artikel ilmiah, laporan, catatan, gambar, atau unggahan media sosial yang relevan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi. Menurut Sugiyono (2023), triangulasi merupakan metode yang mengombinasikan berbagai teknik dan sumber pengumpulan data. Adapun sumber data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Mathinson (1988) dalam Sugiyono (2023) menegaskan bahwa triangulasi bertujuan untuk menelaah apakah data yang diperoleh bersifat komprehensif, konsisten, kontradiktif, atau masih belum jelas. Dengan demikian, tujuan utama triangulasi bukan untuk menemukan kebenaran absolut mengenai suatu fenomena, melainkan untuk memperkaya pemahaman peneliti terhadap

temuan yang dihasilkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2023) mengemukakan wawancara merupakan suatu proses interaksi terstruktur antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan melalui pertanyaan dan jawaban dengan tujuan memperoleh informasi, pandangan, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur mendalam dengan informan yang relevan. Teknik ini dipilih karena mampu menggali informasi secara lebih detail mengenai pengalaman, pemahaman, serta pandangan informan terkait implementasi transformasi sistem pendataan sosial dari DTKS ke DTSEN dalam PKH. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh data primer yang bersifat kualitatif sehingga memungkinkan untuk memahami realitas sosial secara lebih komprehensif. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan menggunakan pedoman wawancara terstruktur.

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan didasarkan pada kriteria tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam atau posisi strategis sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan mendukung pemahaman yang komprehensif terhadap subjek maupun konteks sosial yang informasi yang relevan dan mendukung pemahaman yang komprehensif terhadap subjek maupun konteks sosial yang diteliti (Sugiyono, 2023). Adapun infoman dalam penelitian ini sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Keterangan
1.	Pandji Tim Pokja Bansos Direktorat Jaminan Sosial	Berperan dalam aspek teknis administratif pelaksanaan program bantuan sosial, termasuk PKH.
2.	Nawir Daming, S.Si Pranata Komputer Ahli Muda anggota Tim Pelayanan Penggunaan dan Diseminasi Data Kesejahteraan Sosial	Bertanggungjawab dalam pengelolaan data sosial di Kementerian Sosial.
3.	Eko Saputra Ketua Tim Software Development	Tenaga teknis yang secara langsung mengoperasikan, mengelola, dan memastikan aplikasi pendukung DTSEN berjalan dengan efektif.

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025

2. Observasi

Observasi menurut Marshall (1995) dalam Sugiyono (2023) adalah cara bagaimana peneliti belajar mengenai perilaku, dan arti dari perilaku tersebut. teknik penelitian di mana peneliti mengamati secara langsung perilaku dan lingkungan untuk memperoleh pemahaman tanpa menggunakan perantara. Dengan observasi peneliti bisa memahami data yang diperoleh dalam keseluruhan sosial yang tidak diperoleh dalam wawancara sehingga peneliti mendapatkan gambaran langsung yang lebih komprehensif.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dapat mencakup dokumen tertulis, gambar, atau karya signifikan yang dibuat oleh individu tepercaya. Metode ini melibatkan peninjauan berbagai materi tertulis atau visual yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa arsip resmi, laporan kebijakan, peraturan perundang-undangan, notulen rapat, maupun publikasi dari Kementerian Sosial yang terkait dengan implementasi DTSEN dalam meningkatkan ketepatan sasaran PKH.

Tabel 3. Dokumen Penelitian

No	Nama Dokumen
1.	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
2.	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
3.	Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 Tentang Kementerian Sosial
4.	Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang PKH
5.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS
6.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional
7.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
8.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029
9.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 Tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan (1997) dalam Sugiyono (2023) analisis data adalah proses pengorganisasian dan peninjauan data yang dikumpulkan dari wawancara, catatan lapangan, atau sumber lain agar data lebih mudah dipahami dan dapat dibagikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan pendekatan interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2023). Adapun teknik analisis data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi data, yaitu dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan yang memiliki relevansi langsung dengan kebijakan DTSEN. Observasi dilakukan untuk

memperoleh gambaran faktual mengenai proses pelaksanaan kebijakan transformasi pendataan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, laporan pelaksanaan kebijakan, hasil evaluasi, data statistik, serta publikasi yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh lebih komprehensif, beragam, dan valid.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses mengorganisasi, menyederhanakan, serta memilih informasi yang relevan. Pada tahap ini, peneliti menyoroti aspek-aspek penting, mengidentifikasi tema, serta menemukan pola yang muncul dari data. Dalam tahap ini, peneliti memusatkan perhatian pada hal-hal penting yang berkaitan dengan karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, variabel di luar kebijakan, dan proses implementasinya sebagaimana dijelaskan dalam model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Wahab (2012). Hasil reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih terfokus sehingga memudahkan analisis lanjutan maupun pengumpulan data tambahan apabila diperlukan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada tahap ini, data ditampilkan dalam bentuk uraian naratif, tabel, bagan, maupun matriks sehingga memudahkan peneliti dalam membaca, menafsirkan, dan menemukan hubungan antar kategori data. Penyajian data menampilkan gambaran umum implementasi kebijakan transformasi dari DTKS ke DTSEN dan kontribusi perubahan sistem terhadap ketepatan sasaran penerima manfaat PKH. Melalui penyajian yang terstruktur, peneliti dapat melihat pola, kecenderungan, serta gambaran umum dari hasil penelitian yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan maupun penarikan kesimpulan.

4. Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Pada tahap ini, peneliti berupaya menemukan makna, pola hubungan, serta rumusan temuan dari data yang telah disajikan. Peneliti berupaya menemukan makna substantif terkait bagaimana kebijakan transformasi pendataan DTSEN diimplementasikan, serta sejauh mana kebijakan

tersebut berkontribusi terhadap ketepatan sasaran program PKH. Kesimpulan yang muncul tidak langsung diterima begitu saja, melainkan selalu diuji melalui proses verifikasi, baik dengan membandingkan data yang baru masuk, melakukan triangulasi, maupun meninjau ulang catatan lapangan. Dengan cara ini, kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya bersifat sementara tetapi juga memiliki dasar yang kuat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Terdapat empat standar yang harus dipenuhi oleh penelitian kualitatif dalam teknik keabsahan data antara lain kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Menurut Sugiyono (2023), teknik keabsahan data dalam penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas digunakan untuk menjamin keakuratan data dan informasi yang dikumpulkan sehingga hasil penelitian kualitatif tidak hanya kredibel bagi pihak yang melakukan analisis secara kritis tetapi juga dapat diterima oleh informan yang berkontribusi dalam penyediaan data. Dalam menilai reliabilitas, peneliti menerapkan triangulasi teknik, yaitu dengan memeriksa data dari sumber yang sama melalui penggunaan berbagai metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas ini memeriksa apakah hasil dari suatu tempat atau situasi tertentu dapat digunakan di tempat atau situasi lain. Agar hasil penelitian dapat digunakan oleh orang lain, peneliti harus menulis tentang temuan sejelas dan seakurat mungkin, menunjukkan konteks penelitian dan berfokus pada poin utama penelitian. Bila pembaca memperoleh gambaran yang jelas terkait penelitian yang dilakukan, maka hal tersebut memenuhi standar transferabilitas.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas dapat digunakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak. Sebuah penelitian dapat diandalkan jika penelitian lain dapat mengikuti langkah yang sama dan mendapatkan hasil yang serupa. Dalam penelitian kualitatif, ketergantungan diperiksa dengan meninjau keseluruhan proses penelitian secara saksama.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif, konfirmabilitas dan dependabilitas dapat dinilai secara bersamaan. Konfirmabilitas mengacu pada sejauh mana temuan penelitian dihasilkan melalui proses penelitian itu sendiri. Jika temuan benar-benar didasarkan pada apa yang terjadi selama penelitian, maka penelitian tersebut memenuhi standar konfirmabilitas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Transformasi dari DTKS menuju DTSEN merupakan perubahan sistem pendataan dalam bantuan sosial, yang beralih dari mekanisme berbasis usulan administratif yang subjektif menjadi pendekatan berbasis statistik yang objektif. Implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik dalam meningkatkan ketepatan sasaran PKH dengan menggunakan metode pemeringkatan kesejahteraan yang mengintegrasikan data Regsosek, DTKS, dan P3KE. DTSEN meminimalisir ketidaktepatan sasaran penerima yang sebelumnya marak terjadi, serta mempersempit ruang diskresi dan manipulasi data di tingkat lokal walaupun belum optimal.

1. Berdasarkan variabel karakteristik, implementasi DTSEN memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Integrasi berbagai basis data dengan metodologi dan siklus pembaruan berbeda menimbulkan kesulitan teknis dan risiko kualitas data. Heterogenitas sosial ekonomi kelompok sasaran menuntut diskresi pelaksana meskipun sebagian dapat diredam melalui pendamping berbasis wilayah. Besarnya proporsi populasi rentan dibanding kuota PKH meningkatkan beban administratif dan potensi resistensi sosial. Selain itu, tuntutan perubahan perilaku dari praktik subjektif ke sistem objektif berbasis data menjadikan implementasi DTSEN sangat bergantung pada kapasitas pelaksana dan konsistensi sistem.
2. Berdasarkan karakteristik kebijakan, DTSEN memiliki regulasi hierarkis yang jelas dan saling melengkapi. Teori kausal kebijakan bersifat logis dan berbasis bukti melalui integrasi data dan pemeringkatan desil serta keterlibatan kelompok sasaran. Keterpautan antarlembaga serta konsistensi

aturan pelaksana relatif terjaga dan menekan ego sektoral. Namun, alokasi sumber daya finansial belum seimbang, terutama untuk kebutuhan operasional lapangan dan beban pendamping sosial di lapangan.

3. Berdasarkan variabel di luar kebijakan dalam implementasi DTSEN, kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi relatif adaptif, namun masih terkendala literasi digital dan ketimpangan infrastruktur. Dukungan publik bersifat legitimatif sekaligus kritis, terutama terkait keadilan desil dan kecepatan pemutakhiran data. Sikap masyarakat menunjukkan pergeseran dari resistensi menuju penerimaan rasional seiring meningkatnya transparansi. Selain itu, DTSEN juga disukung dengan adanya dukungan dan komitmen dari lembaga atasan dan aparat pelaksana.
4. Dalam proses implementasinya, DTSEN sudah berjalan walaupun belum optimal. DTSEN memiliki output kebijakan relatif jelas dan terstruktur melalui regulasi teknis, sistem desil, dan ekosistem digital yang menekan subjektivitas. Kepatuhan kelompok sasaran terbentuk secara rasional melalui insentif dan pengawasan teknologi, meskipun manipulasi masih ditemukan. Dampak kebijakan terlihat pada peningkatan akurasi data, partisipasi publik, dan ketepatan sasaran PKH, tetapi masih terbatas oleh kuota dan kapasitas. Selain itu, kebijakan DTSEN juga masih diperlukan perbaikan-perbaikan yang dapat menyempurnakan kebijakan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui dan menjadi bahan pertimbangan dalam menafsirkan hasil penelitian, sekaligus membuka ruang bagi penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini meliputi hal-hal berikut.

1. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dari sisi jumlah dan variasi informan. Informan yang diwawancarai belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan DTSEN di lapangan. Kondisi ini berpotensi membatasi keluasan perspektif yang diperoleh, khususnya dalam menangkap variasi

pengalaman dan dinamika implementasi kebijakan oleh pendamping sosial di tingkat lapangan.

2. Peneliti mengalami kendala dalam memperoleh data pendukung yang bersifat komprehensif, mutakhir, dan terpublikasi secara terbuka, terutama data teknis terkait pemutakhiran DTSEN yang secara kebijakan ini baru diimplementasikan. Keterbatasan akses terhadap data tersebut membatasi ruang analisis yang lebih mendalam dan komparatif.
3. Penelitian ini memiliki cakupan yang bersifat nasional, sehingga peneliti menghadapi keterbatasan dalam menjangkau seluruh wilayah secara langsung, terutama daerah terpencil, terdepan, dan terluar (3T). Akibatnya, pengumpulan data lapangan belum sepenuhnya mampu merepresentasikan kondisi empiris di seluruh wilayah Indonesia, dan sebagian temuan masih bergantung pada data sekunder serta hasil wawancara terbatas.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan DTSEN dalam mendukung ketepatan sasaran PKH.

1. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur pendataan dan integrasi sistem digital agar proses pemutakhiran dan validasi data dapat dilakukan lebih cepat, seragam, dan minim kesalahan.
2. Peningkatan kapasitas server dan infrastruktur teknologi informasi menjadi kebutuhan mendesak untuk mengantisipasi lonjakan akses pengguna.
3. Meninjau ulang strategi pembiayaan kebijakan dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk biaya operasional verifikasi dan validasi faktual di lapangan
4. Perlu dilakukan pelatihan teknis dan pendampingan digital secara berkelanjutan bagi pemerintah daerah dan pendamping sosial, mengingat peran krusial mereka sebagai penghubung antara kebijakan dan masyarakat.

5. Pemerintah perlu melakukan transparansi mengenai kriteria, proses pemeringkatan kesejahteraan, serta siklus pembaruan data dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan konflik sosial di tingkat lokal.
6. Pemerintah perlu melengkapi kebijakan DTSEN dengan kebijakan yang berbasis pendekatan sosial dan perilaku untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, khususnya bagi keluarga yang sudah tidak memenuhi kriteria namun masih enggan keluar dari kepesertaan bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. Z. I., Zaid, M., & Alam, A. A. F. (2023). Digitalisasi Sistem Perlindungan Sosial Kebijakan di Indonesia sebagai Langkah Menuju Masyarakat 5.0. *Journal Social Society*, 3(2), 95–112. <https://doi.org/10.54065/jss.3.2.2023.335>
- Ariansyah, D., Sagita, M., Julia, R. A., & Sarmila. (2025). Analisis Faktor Penyebab Ketidakmerataan Penyaluran Bansos kepada Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, 2(10). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15482268>
- Ayu, F. M., Pramono, J., & Kusuma, P. (2024). Deskriptif Analitik Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Solidaritas FISIP UNISRI*, 8(2).
- BAPPENAS, & UNICEF. (2024). *“Integrated Socioeconomic-Registration System for Indonesia: A Design Report.*
- Berita Depok. (2025). *Tingkatkan Kapasitas, Dinsos Depok Gelar Bimtek Pengelolaan DTSEN Melalui Aplikasi SIKS-NG.* berita.depok.go.id. Diakses pada 14 Oktober 2025. <https://berita.depok.go.id/tingkatkan-kapasitas-dinsos-depok-gelar-bimtek-pengelolaan-dtsen-melalui-aplikasi-siks-ng>
- BPS. (2025). *Tingkat Kemiskinan Kembali Menurun Bagikan.* Badan Pusat Statistik. Diakses pada 10 Agustus 2025. <https://www.bps.go.id/id/news/2025/07/25/731/tingkat-kemiskinan-kembali-menurun.html>
- Damayanti, D., Stiawati, T., & Arenawati, A. (2025). Program Keluarga Harapan dalam Kerangka Sustainable Development Goals (SDGs): Kajian Literatur terhadap Kontribusinya terhadap Tujuan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 4(3), 637–642. <https://doi.org/10.37676/mude.v4i3.8698>
- Diansyah. (2025). *Data Bansos di Nunukan Bermasalah, ASN hingga Anggota DPRD Masuk Daftar Penerima Manfaat.* Pusaran Media. Diakses pada 20 Desember 2025. <https://pusaranmedia.com/read/44509/data-bansos-di->

nunukan-bermasalah-asn-hingga-anggota-dprd-masuk-daftar-penerima-manfaat

- Dinsos Kota Pariaman. (2025). *Pemerintah Perkuat Akurasi Data Bansos Melalui Dtsen*. dinassosialkotapariaman.blogspot.com. Diakses pada 8 September 2025. <https://dinassosialkotapariaman.blogspot.com/2025/06/pemerintah-perkuat-akurasi-data-bansos.html>
- Diputra, I. K. D. R., Wijaya, K. A. S., & Wirantari, I. D. A. P. (2025). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tabanan (Studi Kasus di Kecamatan Tabanan). *Socio-political Communication and Policy Review*, 2(4). <https://doi.org/10.61292/shkr.261>
- Djunaedi, Nurmansyah, T., Kafiar, M. H. P., Ronsumbre, B. A., Ruslan, Alkatiri, F., Rumbiak, J. V., & Awak, P. Y. (2025). *Implementasi Kebijakan dan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor*. 4(4), 5096–5102. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3775>
- Dwiarto, R. (2023). Inovasi Penyaluran Jaminan Sosial Tepat Sasaran Melalui Kebijakan Pengelolaan Anggaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Pemanfaatan Aplikasi " Cek Bansos ". *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, 204–215.
- Dwinanto. (2025). *Memahami Arti Desil yang Menjadi Dasar Pemberian Bansos*. krandegan.id. Diakses pada 20 Desember 2025. <https://krandegan.id/artikel/2025/12/1/memahami-arti-desil-yang-menjadi-dasar-pemberian-bansos>
- E-Media. (2024). *Banyak Penyaluran Bansos Tak Tepat Sasaran, Legislator Minta Kemosos Segera Perbaiki DTKS*. emedia.dpr.go.id. Diakses pada 20 Desember 2025. <https://emedia.dpr.go.id/2024/05/21/banyak-penyalaran-bansos-tak-tepat-sasaran-legislator-minta-kemosos-segera-perbaiki-dtks/>
- Fenanlampir, J. (2025). *Proses Pendataan DTSEN di Tanimbar dan Harapan SDM PKH*. rri.co.id. Diakses pada 20 Desember 2025. <https://rri.co.id/daerah/1399507/proses-pendataan-dtsen-di-tanimbar-dan-harapan-sdm-pkh>
- Firdausy, C. M., & Budisetyowati, D. A. (2022). Variables, Dimensions, and Indicators Important to Develop the Multidimensional Poverty Line Measurement in Indonesia. *Social Indicators Research*, 162. <https://doi.org/10.1007/s11205-021-02859-5>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Dalam *Princeton New Jersey*.

- Hanavi, R., & Sihombing, S. M. (2025). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Keluarga Miskin di Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota Binjai (Studi Kasus pada Dinas Sosial Kota Binjai dan Kantor Kelurahan Pekan Binjai). *Al-Faqih: Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora, Teknik*, 1(4).
- Hasnaini. (2025). *Ini 39 Variabel yang Digunakan Petugas Saat Melakukan Ground Check DTSEN*. kesbangpol.acehbaratdayakab.go.id. Diakses pada 20 Desember 2025. <https://kesbangpol.acehbaratdayakab.go.id/berita/kategori/pemerintahan/ini-39-variabel-yang-digunakan-petugas-saat-melakukan-ground-check-dtsen>
- Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif Muhammad. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 462–469. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>
- Info Hukum. (2025a). *Bansos Tak Tepat Sasaran Capai Rp17 Triliun, Pemerintah Evaluasi Data Penerima*. Infohukum. Diakses pada 14 Oktober 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/bansos-tak-tepat-sasaran-capai-rp17-triliun-pemerintah-evaluasi-data-penerima/>
- Info Hukum. (2025b). *Butuh Waktu Berapa Lama agar Usulan DTSEN Masuk sebagai Penerima Bansos*. fahum.umsu.ac.id. Diakses pada 20 Desember 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/blog/butuh-waktu-berapa-lama-agar-usulan-dtsen-masuk-sebagai-penerima-bansos/>
- Info Hukum. (2025c). *Cara Cek Desil Bansos Kemensos dan Penjelasan Tingkatan Penerima Bantuan Sosial 2025*. Infohukum. Diakses pada 14 Oktober 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/cara-cek-desil-bansos-kemensos-dan-penjelasan-tingkatan-penerima-bantuan-sosial-2025/>
- Info Hukum. (2025d). *Cek Bansos 2025: Fitur Sanggahan Baru Bikin Penyaluran Bantuan Lebih Adil*. fahum.umsu.ac.id. Diakses pada 20 Desember 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/cek-bansos-2025-fitur-sanggahan-baru-bikin-penyalaran-bantuan-lebih-adil/#:~:text=Manfaat Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan,yang lebih adil dan transparan.>
- Info Hukum. (2025e). *Panduan Lengkap Daftar DTSEN Terbaru untuk Dapat Bansos Agustus 2025*. Infohukum. Diakses pada 5 Agustus 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/panduan-lengkap-daftar-dtsen-terbaru-untuk-dapat-bansos-agustus-2025>
- Info Publik. (2025). *Bimtek DTSEN Digelar, Pemkab Bojonegoro Dorong Akurasi Data Pembangunan*. infopublik.id. Diakses pada 27 Desember 2025. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/951613/bimtek-dtsen-digelar-pemkab-bojonegoro-dorong-akurasi-data-pembangunan>

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Datatunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (2025).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (2025).
- Iqbal, M., Nursifa, & Zaskia. (2022). Strategi Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanggulangan Fakir Miskin di Wilayah Perkotaan Kabupaten Tolitoli. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 8(1). <https://doi.org/10.56630/tolis.v8i1.1535>
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. UNG Press Gorontalo.
- Kamariani, B. D., Asbarini, N. F. E., Ridwan, A., & Rahman, A. C. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Journal od Administrative and Social Science*, 5, 205–219. <https://doi.org/10.58406/jeb.v8i3.570>
- Kasmad, R. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 79/Huk/2025 Tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga Untuk Penyaluran Bantuan Sosial Dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial, 1 (2025).
- Khanif, M., Khasan, H., Riasih, T., & Wibisono, E. G. (2024). Persepsi warga masyarakat terhadap aplikasi cek bansos dalam penyaluran bantuan sosial di desa kalikidang kecamatan sokaraja kabupaten banyumas jawa tengah. *Jurnal ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial*, c. <https://doi.org/10.31595/lindayasos.v7i1.1604>
- Komdigi. (2022). *Aplikasi Cek Bansos, Inovasi Kementerian Sosial yang Libatkan Masyarakat untuk Pengelolaan Bansos Tepat Sasaran*. komdigi.go.id. Diakses pada 27 Desember 2025. <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/aplikasi-cek-bansos-inovasi-kementerian-sosial-yang-libatkan-masyarakat-untuk-pengelolaan-bansos-tepat-sasaran>
- Kurniawan, H. A. F. (2024). Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Miskin Di Desa Gorowong Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor. In *repository.uinjkt.ac.id*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Lasari, D., & Ali, H. (2024). Strategi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtk) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Agam. *Jurnal Mirai Management*, 9(1), 2024–2036.

- Maksum, I. (2025). *Bimtek Sosialisasi DTSEN: Dinsos Lamongan Dorong Optimalisasi SDM dan Ketepatan Data Penerima Bantuan di Kembangbahu*. suaranasional.com. Diakses pada 14 Oktober 2025. <https://suaranasional.com/2025/10/06/bimtek-sosialisasi-dtsen-dinsos-lamongan-dorong-optimalisasi-sdm-dan-ketepatan-data-penerima-bantuan-di-kembangbahu/>
- Maran, S. D., & Purnomo, A. S. (2025). Penerapan Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (Saw) Dalam Verifikasi Kelayakan Penerima Pkh Di Desa Daniwato. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 13(3). <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i3.7179>
- Nartin, Rahmatyah, S., & Ansar, T. (2024). Peran Kearifan Lokal, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Tertinggal (Studi Pada Desa Ambuwu Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4). <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14083>
- Noya, J. (2025). Integrasi Kebijakan Sosial Dan Tata Kelola Administrasi Publik: Studi Kasus Program Perlindungan Sosial Di Indonesia. *Jurnal BADATI Ilmu Sosial & Humaniora*, 7(1).
- Novriyansah, M. A. D. (2025). *Ironi Bansos di PALI! Rumah Bagus dan Toke Karet Masuk Daftar Penerima Bantuan Sosial, Stiker Bansos Bongkar Kejanggalan*. citrasumsel.com. Diakses pada 6 Februari 2026. <https://www.citrasumsel.com/pali/602075950/ironi-bansos-di-pali-rumah-bagus-dan-toke-karet-masuk-daftar-penerima-bantuan-sosial-stiker-bansos-bongkar-kejanggalan>
- Nunung, A., Latifah, L., Fatmawati, F., & Sulastri, L. (2025). Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial untuk Menginvestigasi Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial di Desa Rancaekek Kulon Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 62–82. <https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.62-82.2025>
- Nur Qomariyah, H. L., & Mursyidah, L. (2025). *Effectiveness Of The Application Of Social Welfare Information System – Next Generation (Siks-Ng) (Study In Bulusidokare Village, Sidoarjo Regency)*. *Proceeding of International Conference on Social Science and Humanity*, 2(2), 320–333. <https://doi.org/10.61796/icossh.v2i2.267>
- Nurahman, R., Anira Syifa Putri Hermawati, Nurul Wahdah, Silvi Alfiah, Najla Afiah, Dika Hardiansyah, Luthfi Helmi, & Dian Herdiana. (2025). Efektivitas Program Bantuan Sosial Sebagai Sarana Kebijakan Ekonomi Publik. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(5), 215–219. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15588797>

- Nursuhayla, R., Melati, Nursyidah, & Pangestoeti, W. (2025). Evaluasi Ketepatan Sasaran Program Bansos PKH di Provinsi Kepulauan Riau: Studi Kasus Salah Sasaran di Kota Tanjungpinang. *JMEB: Jurnal Management, Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 11–16.
- Ombudsman RI. (2024). *Problematika Bantuan Sosial dan DTKS*. Ombudsman RI. Diakses pada 14 Oktober 2025. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--problematika-bantuan-sosial-dan-dtk>
- Pakaya, P. A., Thalib, T., & Katili, A. Y. (2025). Mekanisme Pendataan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1747>
- Pakaya, R. (2025). Implementasi Aplikasi SIDAK SOSIAL dalam Meningkatkan Efektivitas Pendataan dan Penyaluran Bantuan Sosial di Provinsi Gorontalo. *Journal Of Software Engineering And Communication*, 3(2), 1–7. <https://doi.org/10.56190/jsec.v3i2.72>
- Palili, M. G. I., Indriasari, R., & Mendrofa, D. E. K. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1).
- PANRB, K. (2025). *Sebanyak 1,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dicoret Dari Daftar Penerima Bansos*. Menpan.go.id. Diakses pada 7 September 2025. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/kesalahan-data-kemensos-coret-1-9-juta-penerima-bansos-di-triwulan-i-2025>
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta Bandung.
- Pedoman Bengkulu. (2025). *Bahas Data Bansos Tidak Tepat Sasaran, Bambang ASB Pimpin Audiensi Bersama BPS*. Pedoman Bengkulu. 20 December 2025. <https://www.pedomanbengkulu.com/2025/11/bahas-data-bansos-tidak-tepat-sasaran.html>
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (2018).
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Sosial, 1 (2025).
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data terpadu Kesejahteraan Sosial, 6 (2021).
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025-2029, 1 (2025).

- Permata, S. C., Kurnia, D., & Abidin, Z. (2025). Implementasi Kebijakan Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Sukapura kecamatan Kiaraconfong Kota Bandung. *Jurnal Praxis Idealis*, 02(02). <https://doi.org/10.36859/jp.v1i3.3517>
- Putri, N. A. E. (2024). *Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Sebagai Upaya Meningkatkan Pendistribusian Bantuan Sosial Tepat Sasaran (Studi Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo)*. Universitas Brawijaya.
- Radar Mandalika. (2025). *Forum Kadus Gedor Kantor Dinas Sosial KLU, BLTS Kesra Banyak Salah Sasaran*. radarmandalika.id. Diakses pada 20 Desember 2025. <https://radarmandalika.id/forum-kadus-gedor-kantor-dinas-sosial-klu-blts-kesra-banyak-salah-sasaran/>
- S Marthalina. (2025). Keefektifan Pelaksanaan Sistem Layanan Kesejahteraan Sosial Dalam Penanganan Kemiskinan Di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Saputra, I. D., Alkhairi, F. R., & Nielwaty, E. (2025). Peran Aplikasi Cek Bansos Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Desa Sidodadi, Kecamatan Logas Tanah Darat. *Journal of Golden Generation Economic*, 1, 153–165.
- Saputri, B. F. (2024). *Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Pelayanan Publik*. Universitas Brawijaya.
- Sari, L., Sugianor, & Munawarah. (2025). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Hambuku Lima Dan Desa Sungai Durait Hulu). *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(1).
- Satria. (2025). *Komisi III DPRD Kepulauan Meranti Bahas Kendala dan Solusi Pendataan DTSEN*. sinkap.info. <https://sinkap.info/2025/03/komisi-iii-dprd-kepulauan-meranti-bahas-kendala-dan-solusi-pendataan-dtsen/>
- Satriani. (2025). *Bansos Pkh Dan Bpnt Dihapus Setelah 5 Tahun? Ini Fakta Lengkap Penjelasan Menteri Sosial Gus Ipul, Jadwal Cair Terbaru, Dan Data Baru Penerima Bansos*. dinsos.jogjaprov.go.id. Diakses pada 20 Desember 2025. <https://dinsos.jogjaprov.go.id/berita/detail/bansos-pkh-dan-bpnt-dihapus-setelah-5-tahun-ini-fakta-lengkap-penjelasan-menteri-sosial-gus-ipul-jadwal-cair-terbaru-dan-data-baru-penerima-bansos>
- Senjaya, I. C. (2025). *Gus Ipul: Pemerintah buka diri terhadap masukan pemutakhiran DTSEN*. jatim.antaranews.com. Diakses pada 20 Desember 2025. [https://jatim.antaranews.com/berita/1006941/gus-ipul-pemerintah-buka-diri-terhadap-masukan-pemutakhiran-dtsen#:~:text=Sebagai salah satu bentuk dukungan dalam pemutakhiran,tingkat desa untuk membantu memasukkan pembaruan data.](https://jatim.antaranews.com/berita/1006941/gus-ipul-pemerintah-buka-diri-terhadap-masukan-pemutakhiran-dtsen#:~:text=Sebagai%20salah%20satu%20bentuk%20dukungan%20dalam%20pemutakhiran,tingkat%20desa%20untuk%20membantu%20memasukkan%20pembaruan%20data.)

- Setiawan, P., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2024). Determinan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(1), 161–171. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.688>
- Setyanto, W. (2025). Data Tunggal Sosial Ekonomi, Penurunan Kemiskinan, dan Pembangunan Berkelanjutan : Pengalaman Indonesia. *KRITIS*, XXXIV, 266–283. <https://doi.org/10.24246/kritis.v34i1p266-284>
- Sistem Informasi Desa Rensing Bat. (2022). *Sejarah Panjang Terwujudnya BDT / DTKS*. Sistem Informasi Desa Rensing Bat. Diakses pada 8 September 2025. <https://www.rensingbat.desa.id/artikel/2022/1/9/sejarah-panjang-terwujudnya-bdt-dtks>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Dalam Sutopo (Ed.), *Ready to Dive*. Alfabeta Bandung.
- Suriyani BB, La Ode Agus Said, Rifal, & Usman. (2025). Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kecamatan Lawa Kabupaten Muna Barat. *Journal Publicuho*, 8(2). <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i2.867>
- Syamsu J. (2025). Analisis Kebijakan Bantuan Sosial terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Digital Kabupaten Sijunjung. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 7688–7696. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3144>
- Tempo. (2025). *Pemerintah Salurkan Bansos pada Pekan Ketiga Mei*. Tempo. Diakses pada 14 Oktober 2025. <https://www.tempo.co/politik/pemerintah-salurkan-bansos-pada-pekan-ketiga-mei-1394249>
- Tohir, M. (2026). *Pemasangan Stiker “Keluarga Miskin” di Bojonegoro, Upaya Perbaikan Data Kemiskinan Daerah*. beritabojonegoro. Diakses pada 6 Februari 2026. <https://beritabojonegoro.com/read/27831-pemasangan-stiker-keluarga-miskin-di-bojonegoro-upaya-perbaikan-data-kemiskinan-daerah.html>
- Trinoto. (2025). *Data DTSEN Dinilai Belum Valid, Penerima Bansos Pacitan Jadi Sorotan*. beritajatim.com. Diakses pada 20 Desember 2025. <https://beritajatim.com/data-dtsen-dinilai-belum-valid-penerima-bansos-pacitan-jadi-sorotan>
- Tulak Andi, E., Kasmawati Andi, A., Khaer Hanafie, N., Negeri Makassar, U., & Artikel ABSTRAK Riwayat Artikel, I. (2025). *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Hal. 13(2)*, 494. <https://doi.org/10.37081/ed.v13i2.6827>
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.

Yod, Y., Teturan, Y. E., & Lekatompessy, R. L. (2025). Paradoks Perlindungan Sosial: Analisis Kesenjangan antara Kebijakan dan Praktik Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Merauke. *Musamus Journal of Public Administration*, 8(1). <https://doi.org/10.35724/mjpa.v8i1.7325>